



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL, INSPEKTUR JENDERAL, KEPALA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN KEPALA
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PUPR RI**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 27 Juni 2022
Waktu : Pukul 10.00 s.d. 13.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual Zoom
Cloud Meeting
- Ketua Rapat : H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S. (F-PPP) – Wakil
Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai
bulan Mei 2022;
2. Membahas rencana alokasi anggaran menurut
fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA
2023 masing-masing unit eselon I.
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR
RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
43 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
9 dari 11 orang Anggota
 1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
 2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
 3. Mochamad Herviano
 4. Sukur H. Nababan, S.T.
 5. Ir. Sudjadi
 6. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
 7. H. Irmadi Lubis
 8. Ir. Effendi Sianipar
 9. Harvey B. Malaihollo
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
6 dari 8 orang Anggota
 1. Ir. Ridwan Bae
 2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
 3. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.

4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
5. Muhammad Fauzi, S.E.
6. Ir. H. Anang Susanto, M.Si.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)

7 dari 7 orang Anggota

1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
2. Ir. Sumail Abdullah
3. Sudewo, S.T., M.T.
4. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
5. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
6. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
7. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

4 dari 6 orang Anggota

1. Roberth Rouw
2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
3. Drs. H. Soehartono, M.Si.
4. Drs. Fadholi, M.Ikom.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)

4 dari 6 orang Anggota

1. H. Ruslan M. Daud
2. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
3. Sofyan Ali, S.H.
4. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

5 dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
2. H. Mohamad Muraz, S.H., M.M.
3. drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
4. Lasmi Indaryani, S.E.
5. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)

2 dari 5 orang Anggota

1. Ir. H. Sigit Sosiantomo
2. KH. Toriq Hidayat, Lc.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)

4 dari 5 orang Anggota

1. H.A. Bakri H. M., S.E.
2. Athari Ghauthi Ardi

3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
4. H. Boyman Harun, S.H.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)
dari 2 orang Anggota
 1. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.
 2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR RI (Ir. Mohammad Zainal Fatah)
2. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR RI (Ir. T. Iskandar, M.T.)
3. Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR RI (Dr. Ir. H. Khalawi Abdul Hamid, MSC. MM.)
4. Kepala BPIW Kementerian PUPR RI (Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/ F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.):

Komisi V DPR RI,

**Yang saya hormati saudara Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM, dan Kepala BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta seluruh jajarannya,
Serta para hadirin yang kami hormati,**

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan lindungan-Nya hingga pada pagi hari ini kita bisa melakukan rapat dengar pendapat bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dihadiri secara fisik dan virtual. Anggota yang hadir 7 orang secara fisik, 15 orang secara virtual, dengan jumlah Fraksi 8 Fraksi. Sehingga sudah memenuhi kuorum. Oleh karena itu rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Komisi V DPR RI mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM, dan Kepala BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta seluruh jajarannya, yang telah memenuhi undangan kami dalam rapat dengar pendapat pada hari ini. Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan RDP pada hari ini diagendakan membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Dan, rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2023 masing-masing Eselon I.

Saudara Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM, dan Kepala BPIW Kementerian PUPR serta Pimpinan dan Anggota Komisi V yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Saudara Menteri PUPR pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2022 yang lalu telah disepakati bahwa beberapa hal diantaranya adalah Pagu Indikatif Kementerian PUPR dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar 98,207 Triliun. Dari alokasi Pagu Indikatif tersebut alokasi anggaran untuk Sekretariat Jenderal sebesar 543,61 Miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan antara lain:

- Pengelolaan, perencanaan, dan keuangan.
- Pengelolaan barang milik negara dan penyelenggaraan dan pembinaan informasi publik.

Selanjutnya Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi sebesar 90,26 Miliar yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan antara lain:

- Audit
- *Review*
- Evaluasi
- Pemantauan dan
- Pengawasan lainnya.

Sedangkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memperoleh anggaran sebesar 376,48 Miliar akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan di antaranya:

- Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik (PO)
- Pengembangan kompetensi SDM pusat dan daerah
- Pengembangan talenta dan transformasi digital *learning*

Kemudian Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mendapatkan alokasi sebesar 163,38 Miliar, dipergunakan untuk mendukung berbagai kegiatan di antaranya:

- Penyusunan rancana pembangunan infrastruktur berbasis wilayah,
- Melakukan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur PUPR di seluruh wilayah, dan
- Melakukan tela'ahan strategis untuk membahas isu-isu terkait pengembangan infrastruktur PUPR di masing-masing-wilayah.

Jadi dari keseluruhan para Eselon I yang hadir pada hari ini sepertinya anggarannya kurang lebih hanya 1% dari total APBN Kementerian PUPR, 98 sekian Triliun.

Sejalan dengan itu dalam kesempatan ini kami tegaskan kembali agar dalam proses penyusunan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023, agar tiap-tiap unit organisasi Eselon I benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam seluruh rangkaian rapat kerja dan rapat dengar pendapat sampai dengan hari ini.

Demikianlah pengantar singkat dari kami, selanjutnya kami serahkan kepada Pejabat Eselon I Kementerian PUPR, untuk menyampaikan penjelasannya. Dan, untuk yang pertama kali kami silakan kepada Saudara Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, silakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Bismillahirrahmanirrahim,

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi salam sejahtera,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo budaya,
Salam kebajikan,**

**Yang terhormat dan kami hormati Bapak Pimpinan, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, yang dalam hal ini Pak Tamliha memimpin rapat dengar pendapat pada pagi hari ini.
Yang kami hormati para Anggota Komisi V DPR RI yang hadir langsung di ruangan maupun yang melalui *daring*.**

Terima kasih, kami telah diperkenankan untuk melaporkan dan menyampaikan aktivitas yang sedang kami lakukan di 2022 maupun rencana kerja di 2023 sesuai dengan arahan rapat kerja yang telah dihadiri oleh Bapak Menteri pada beberapa waktu yang lalu tepatnya di 9 Juni lalu. Oleh karena itu, kami mohon izin untuk menyampaikan kembali. Mohon mungkin kami akan mengulangi beberapa hal yang biasanya sudah dilakukan, tetapi karena ada beberapa pergantian Anggota baru mohon izin untuk beberapa kami ulangi lagi.

Bahwa sekretaris, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Secara keseluruhan berada dalam satu program yaitu dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh 10 unit kerja, yang terdiri dari 7 Biro dan 3 Pusat. Dalam hal ini ada, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri. Kemudian Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Biro Keuangan, Biro Umum, Biro Hukum, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Komunikasi Publik, Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan, Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah.

Ibu-Bapak para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Secara umum, kinerja Kementerian PUPR khususnya di bidang layanan manajemen telah memperoleh apresiasi dari berbagai pihak. Dapat kami laporkan penghargaan kinerja anggaran Tahun 2021 dengan predikat sangat baik dengan nilai 93,43 pada kelompok K/L kategori Pagu besar yang kami peroleh dari Kementerian Keuangan. Penghargaan keberhasilan menerapkan sistem merit manajemen ASN dengan peringkat predikat sangat baik dari

Komisi Aparatur Sipil Negara. Opini tanpa, *eh*, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI atas laporan keuangan Kementerian PUPR Tahun 2020. Dan, secara formal untuk 2021 kami belum mendapatkan tetapi dari laporan LKPP yang telah disampaikan kepada DPR, *insyallah* PUPR kembali mendapatkan WTP.

Juara 1 penghargaan Subroto pada Tahun 2021 untuk penghematan energi di gedung pemerintahan dari yang kami terima dari Kementerian ESDM. Juara 1 keberhasilan melakukan sertifikasi barang milik negara kelompok K/L dengan jumlah Satker lebih dari 100 Satker, pada BMN *award* Tahun 2021 yang kami dapatkan dari Kementerian Keuangan. Predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik Tahun 2021 dengan nilai 86,19 merupakan kategori zona hijau yang kami peroleh atas dasar penilaian Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan atas kerja sama dan bantuan program hibah jalan daerah dari Gubernur Sulawesi Tenggara. Sebagaimana yang Bapak-Ibu pahami semua bahwa kami menyelenggarakan bantuan program hibah jalan daerah ini sebagai bentuk dari respon Pemerintah Pusat untuk lebih banyak membantu penyelesaian jalan-jalan di daerah.

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2022 hingga bulan Mei 2022, sebagaimana diarahkan pada agenda RDP dapat kami laporkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Dipa Tahun 2022, alokasi anggaran Sekjen Kementerian PUPR adalah 591,77 Miliar. Menindaklanjuti surat Menteri Keuangan terkait *automatic adjustment* pada Tahun 2021, maka ada 3,7 Triliun yang harus kita lepaskan dari anggaran Menteri PUPR. Oleh karena itu, maka di Sekretariat Jenderal juga melakukan *automatic adjustment* sejumlah 38,47 Miliar atau 6,5% berdasarkan surat Menteri PUPR tertanggal 8 Desember 2021.

Pagu AA yang kedua, juga kami peroleh berdasarkan surat Kementerian Keuangan tentu kami harus menindaklanjuti, sekarang sedang dalam proses finalisasi yang angkanya kurang lebih sama dengan periode AA yang pertama. Pagu belanja operasional, belanja rutin sebesar 303,14 Miliar atau 51,1%, digunakan untuk belanja pegawai 110,49 Miliar dan belanja barang operasional sebesar 192,65 Miliar. Sedangkan, untuk Pagu belanja non rutin sebesar 288,62 Miliar atau 48,8%. Terdiri dari belanja barang non operasional sebesar 261,27 Miliar dan belanja modal sebesar 27,35 Miliar. Hingga akhir Mei 2022, realisasi keuangan Kementerian PUPR sebesar 25,41 Triliun atau 23,23 dari total Pagu dengan capaian fisik 26,69%. Sedangkan, untuk Sekretariat Jenderal mencapai 166,57 Miliar atau 28,15% dari total Pagu 591,77 Miliar. Secara persentase memang melampaui rata-rata Kementerian PUPR, karena sebagian besar kita gunakan untuk keperluan rutin.

Untuk status *progres* 17 Juni realisasi keuangan Sekretariat Jenderal 2022 sebesar 197,88 atau telah bergerak lebih dari 10% dibandingkan akhir Mei lalu, sehingga mencapai 33,44% dengan capaian fisik 32,29%. Sehingga, dengan demikian maka rencana penyerapan hingga akhir Tahun 2022 atau prognosis yang kami ajukan sebesar 93,5%. *Progres* kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Mei oleh Sekretariat Jenderal meliputi: Pengelolaan perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi dan

kerja sama luar negeri dengan *progres* keuangan sebesar 31,58% dan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain telah menyusun 43 rencana aksi nasional.

Hubungan kerja sama internasional sebanyak 42 *register* pinjaman dan empat unit, empat buah hibah luar negeri, serta evaluasi capaian SAKIP Kementerian dan unit organisasi. Pengelolaan dan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana dengan *progres* keuangan sebesar 26,89% dengan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: Pemeliharaan data SDM yang terpusat melalui EHRM untuk 40.323 pegawai, manajemen SDM untuk 6.000 pegawai, dan pembinaan 7.865 jabatan fungsional.

Dalam hal pengelolaan keuangan, kami telah melaksanakan hingga mencapai *progres* keuangan mencapai 21,61% dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain: pendampingan dan konsolidasi 689 laporan kuasa pengguna anggaran atau barang dan 12 laporan PHLN Tahun Anggaran 2021. Tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI sebanyak 67% selesai dari target 70% dan penyusunan tiga laporan pengendalian.

Untuk pengelolaan umum dengan *progres* keuangan mencapai 32,61% dengan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: rehabilitasi 13 bangunan gedung, perbaikan sarana utilitas di 23 lokasi dan pelaksanaan vaksin untuk *booster*. Pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum dengan *progres* keuangan mencapai 26,2%, serta kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: penyusunan 35 produk hukum, 27 MoU atau PKS dan penanganan 56 perkara.

Dalam hal pengelolaan barang milik negara, *progres* keuangan telah mencapai 27,8% dengan kegiatan antara lain: pemrosesan izin kerja sama struktur sebanyak 2 usulan. Untuk mendukung proyek strategis nasional, tindak lanjut LHP BPK terkait revaluasi BA-06 yaitu BMN yang tidak ditemukan dan penetapan 491 persetujuan hibah. Persetujuan hibah umumnya adalah bangunan-bangunan atau infrastruktur yang dibangun oleh PUPR untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau kementerian/lembaga terkait.

Penyelenggaraan dan pembinaan informasi publik dengan *progres* keuangan sebesar 25,7% digunakan untuk kegiatan antara lain: 350 kegiatan kehumasan antara lain pengelolaan media sosial yang saat ini capaian seluruh akun resmi Kementerian PUPR sebanyak 2,35 juta *followers* dan *press conference* 43 kegiatan publikasi dan 361 bahan informasi pimpinan.

Dalam hal pengkajian dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dengan *progres* keuangan 32,87% kami melaksanakan kegiatan antara lain: pemantauan dan evaluasi 280, maaf, 264 laporan dalam hal ini mencakup 1.553 kebijakan, penyusunan 2 *policy brief* dan 1 *policy memo*.

Pengelolaan data dan teknologi informasi bidang PUPR dengan *progres* keuangan 25,92% yang digunakan untuk kegiatan antara lain: pengelolaan 316 sistem aplikasi, pengembangan dua *super apps* serta pengelolaan data geospasial dan statistik mencakup 10 aplikasi utama. Pada pusat untuk

pengolahan data dan teknologi informasi ini, kami juga tentu melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya **ladder** untuk lokasi IKN.

Dalam hal penyelenggaraan fasilitas infrastruktur daerah, kami telah mencapai *progres* 16,32% yang digunakan untuk kegiatan verifikasi data teknis Tahun Anggaran 2022 bidang jalan dan bidang irigasi, sosialisasi arah kebijakan DAK Tahun 2023 di 541 Provinsi Kabupaten Kota dan Pemantauan dan Evaluasi Triwulan I, terhadap 11.326 kegiatan DAK fisik di 541 Provinsi Kabupaten Kota yang mencakup bidang irigasi, jalan, air minum, sanitasi dan perumahan.

Ibu-Bapak Pimpinan dan para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Untuk rencana kegiatan Sekjen pada Tahun 2023 kami laporkan dan kami usulkan sebagai berikut. Pagu Anggaran Kementerian PUPR TA 2023 sebesar 98,21 Triliun. Sedangkan Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal sebesar 543,61 Miliar atau 0,55 atau menurun dari Tahun 2022 sebesar 591,77 Miliar. Pagu tersebut akan digunakan sebagai Pagu belanja operasional sebesar 324,19 atau 59,72%. Terdiri dari belanja pegawai 104,02 Miliar dan belanja operasional 220,65 Miliar. Sedangkan untuk Pagu Belanja Non Rutin 218,93 Miliar atau 40,27%. Terdiri dari belanja barang non operasional 198,38% dan belanja modal 20,55%.

Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan Sekretariat Jenderal sebagaimana tadi *item*-nya sudah kami jelaskan sebelumnya akan digunakan untuk:

- Pengolahan perencanaan sebesar 44,69 Miliar.
- Pengelolaan dan pengadministrasian pegawai organisasi dan tata laksana sebesar 27,4 Miliar.
- Pengelolaan keuangan sebesar 23,24 Miliar.
- Pengelolaan umum 173,44 Miliar.
- Pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum sebesar 21,32 Miliar.
- Pengelolaan Barang Milik Negara sebesar 38,46 Miliar.
- Penyelenggaraan dan pembinaan informasi publik sebesar 37,19 Miliar
- Pengkajian dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sebesar 36,8 Miliar
- Pengelolaan data dan teknologi informasi bidang PUPR sebesar 105,48 Miliar.

Ibu-Bapak Pimpinan dan para Anggota,

Khusus pengolahan data dan teknologi informasi bidang PUPR memerlukan alokasi yang paling besar diantara unit-unit kerja di kesekjenan. Karena di sini di Pusdatin ini kami melakukan layanan utama antara lain:

- Pengolahan 316 sistem aplikasi yang nantinya migrasi ke *cloud* dan pusat data negara.
- Layanan data dan informasi terhadap 40.326 Pegawai PUPR.
- Pengelolaan kebijakan SPBE, kami melakukan pemantauan terus-menerus atas SPBE dan menjaga kehandalan sistem ini.

- Pengelolaan portal 9 perizinan.
- Kolaborasi digital *super, super apps* dan 30.000 akun *work collaboration* para pegawai PUPR.
- Pengembangan aplikasi Bravo dan sahabat PUPR.
- Layanan jaringan terhadap 8.516 pegawai pusat.
- 10 aplikasi manajemen geospasial dan statistik infrastruktur.
- Pembinaan 96 jabatan fungsional pranata komputer, 56 *surveyor* pemetaan dan 4 **statistisi**.

Dan, yang terakhir adalah penyelenggaraan fasilitas infrastruktur daerah sebesar 35,57 Miliar. Dengan target layanan utama ke depan adalah fasilitasi pembinaan, pemantauan, dan evaluasi DAK fisik, serta penerapan SPM di 34 Provinsi, 514 Kabupaten Kota dan program hibah jalan daerah di 3 KSPN, 3 Provinsi dan 4 Kabupaten. Ke depan dengan akan diwujudkan Inpres untuk bantuan jalan daerah maka salah satu tambahan tugas untuk fasilitas infrastruktur daerah adalah melakukan *processing* usulan bersamaan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka memberikan kemudahan kecepatan layanan, maka Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR melakukan transformasi di bidang pelayanan publik antara lain:

- Di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri kami terus melanjutkan *me-maintenance integrated e-monitoring* untuk pemantauan secara *real-time* pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR. Kami bisa melihat *progres* setiap paket pekerjaan dari aplikasi ini.
- Kemudian, di Biro Pegawai dan Organisasi dan Tata Laksana, kami memiliki aplikasi EHRM untuk dukungan implementasi sistem merit ASN PUPR. Ini bisa diakses bukan hanya dari komputer juga dari aplikasi di *mobile phone*.
- Kemudian di Biro Keuangan kami memiliki e-keuangan PUPR untuk pemantauan pelayanan keuangan secara elektronik. Tentu dari sini seluruh aktivitas yang terkait dan keuangan dapat kami jalankan.
- Untuk Biro Umum, manajemen vaksin covid-19 untuk mendukung 100% vaksinasi SDM PUPR telah dimulai sejak awal masa pandemi dan sistem antrian yang kami kembangkan telah digunakan oleh banyak Kementerian lain dan menjadi inspirasi khususnya pada awal-awal pandemi.
- Biro Hukum integrasi JDIH dengan fitur konsultasi publik untuk mendukung konsultasi hukum, dan
- Di Biro Pengelolaan Barang Milik Negara kami lakukan optimalisasi pengelolaan barang milik negara agar menjadi jauh lebih efisien dan efektivitas pengelolaan aset PUPR menjadi meningkat.
- Sedangkan di Biro Komunikasi Publik kami melakukan pelayanan publik terpadu agar tercapai kemudahan dan kecepatan layanan publik.
- Khusus pusat analisis pelaksanaan kebijakan kami kembangkan e-pusaka untuk penyusunan dan pengawasan. Tentu *monitoring* pelaksanaan kebijakan PUPR yang berdayaguna di melalui aplikasi ini kami bisa mengendalikan sampai seberapa jauh para unit organisasi telah menindaklanjuti kebijakan-kebijakan Kementerian.

- Pusat data dan teknologi informasi, aplikasi sahabat PUPR sebagai upaya implementasi pelayanan publik dalam genggaman dan aspirasi untuk memudahkan penyampaian aspirasi DPR.

Mohon izin Ibu-Bapak para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Kami sedang menyiapkan aplikasi khusus untuk memastikan bahwa aspirasi Ibu-Bapak terus dapat dimonitor dan dapat dijalankan. Kami mohon perkenan nanti arahan apakah ini hanya bisa diakses oleh siapa saja sedang kami persiapkan. Sehingga *insyaAllah* untuk tahun depan bisa kita gunakan bersama-sama.

Untuk pusat fasilitasi infrastruktur daerah melalui *e-monitoring* DAK ini untuk sinkronisasi pembangunan infrastruktur di pusat dan daerah.

Ibu-Bapak Pimpinan dan para Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Demikian laporan kami, mudah-mudahan kami mendapatkan bimbingan, koreksi atas hal-hal yang akan direncanakan ke depan agar kita bisa bersama-sama menjalankan amanah yang ada di kita masing-masing.

*Billahitaufik wal hidayah,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Muhammad Zainal Fatah, Sekjen Kementerian PUPR. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ir. Tengku Iskandar, M.T. sebagai Inspektur Jenderal untuk menyampaikan paparan.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):

Baik terima kasih, Bapak Pimpinan,

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat dan kami hormati Bapak Ketua dan Wakil Ketua,
Serta Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang berbahagia,**

Seperti yang sudah disampaikan secara umum tadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan oleh Bapak Sekjen dan kami melanjutkan kegiatan yang ada di Inspektorat Jenderal. Seperti kita mengetahui bahwa untuk DIPA awal Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2022 sebesar 101,7 Miliar dan saat ini mengikuti kebijakan Pemerintah untuk dilakukan *automatic adjustment* dari Kementerian Keuangan berupa pencadangan anggaran sebesar 5 Miliar atau lebih kurang sekitar 5% dari Pagu Anggaran.

Sehingga alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan *intern* adalah sebesar 96,7 Miliar. *Progres* realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022, Inspektorat Jenderal telah dapat merealisasikan sebesar 33,62 Miliar atau 33,07% dari rencana 35,08%. Atas realisasi tersebut capaian fisik telah mencapai 39,59% dari rencana 40,36%. Kebijakan pengawasan Tahun Anggaran 2022, Inspektorat Jenderal melaksanakan pada tiga fokus.

1. Pengawasan penyelenggaraan infrastruktur Kementerian PUPR dengan tema pengawasan terhadap kegiatan direktif dan strategis serta pengawasan atas dukungan manajemen penyelenggaraan infrastruktur PUPR.
2. Pengawasan terhadap penatausahaan BMN dan di Kementerian PUPR dengan tema pengawasan terhadap perencanaan dan penatausahaan BMN di seluruh unit organisasi Kementerian PUPR.
3. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik melalui:
 - 1) Pengawasan atas penyelenggaraan SPIP, penerapan manajemen risiko,
 - 2) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan,
 - 3) Peningkatan kepatuhan dan integritas aparatur, serta
 - 4) Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan.

Perlu dilakukan implementasi dari Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka mensukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Sehingga saat ini Inspektorat Jenderal telah memulai melaksanakan pengawasan implementasi P3DN sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas pengawasan *intern* pada tanggal 14 Juni 2022.

Sejalan dengan masukan serta arahan dari Pimpinan dan Anggota Komisi V pada Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 2 Februari Tahun 2022 terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2021 dan Program Kerja Tahun 2022 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan langkah-langkah antara lain:

- Pelaksanaan pemeriksa implementasi P3DN sebagai bagian dari proses audit kinerja terhadap satuan kerja di Kementerian PUPR.
- Peningkatan pemahaman auditor melalui *workshop* pemahaman P3DN bekerjasama dengan BPKP dan Kementerian Perindustrian.
- Penyiapan pedoman evaluasi implementasi P3DN pada unit organisasi di Kementerian PUPR dan pelaksanaan evaluasi implementasi P3DN.
- BPKP melakukan *review* atas kebijakan implementasi P3DN di Kementerian PUPR. Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap implementasi terhadap kegiatan P3DN di Kementerian PUPR.

Realisasi pengawasan *intern* sampai dengan tanggal 23 Juni Tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan audit berupa.

1. Audit kinerja pada bidang sumber daya air, cipta karya, dan bina konstruksi.
2. Audit dengan tujuan tertentu pembangunan rumah susun, pembangunan prasarana PON Papua.
3. Audit yang tidak terprogramkan berdasarkan perintah Menteri PUPR, permohonan aparat penegak hukum dan unit organisasi seperti:
 - a. Verifikasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK, pemeriksaan usulan daftar hitam dan lain-lain, serta pengaduan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan *review* berupa *review* laporan keuangan dan laporan kinerja Tahun 2021, pengendalian *intern* pelaporan keuangan Tahun 2021.
 - c. Pelaksanaan evaluasi berupa evaluasi efektivitas, penerapan manajemen risiko, evaluasi sistem akuntabilitas instansi Pemerintah atau SAKIP, evaluasi internal unit usulan unit kerja zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.
 - d. Pelaksanaan pemantauan berupa pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP dan Inspektorat Jenderal.
 - e. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa.
 - Pendampingan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung acara internasional di Provinsi Bali, NTB, NTT, dan DKI Jakarta yang merupakan penugasan Kementerian PUPR berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021.
 - Pendampingan penanganan dampak bencana antara lain akibat dari pada bencana siklon seroja di Provinsi NTB dan NTT dan erupsi gunung Semeru.
 - Pendampingan pengendalian gratifikasi koordinasi kerja sama pengawasan dan pengamanan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR dengan Kejaksaan Republik Indonesia, POLRI, KPK dan BPKP.
 - Koordinasi pelaksanaan survei penilaian integritas dan penanganan pengaduan dengan KPK.
 - Koordinasi pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan APIP Kementerian dan lembaga lainnya.

Selain itu, rencana pelaksanaan pengawasan *intern* pada Semester kedua Tahun 2022 adalah pelaksanaan audit berupa:

1. Audit kinerja terhadap seluruh unit organisasi
2. Audit dengan tujuan tertentu yang meliputi program pemulihan ekonomi nasional, kegiatan dekonsentrasi tugas perbantuan bidang sumber daya air, Bina Marga.
3. Selanjutnya adalah audit ketaatan berita acara BUN, berita anggaran BUN dan BNPB pada bulan November 2022.
4. Audit yang tidak terprogramkan berdasarkan perintah Menteri PUPR, permohonan aparat penegak hukum dan unit organisasi.

Selanjutnya, pelaksanaan *review* berupa, berupa *review* Laporan Keuangan Semester I dan Triwulan II, Tahun 2022. *Review* tindak lanjut temuan BPK RI atas BMN yang tidak ditemukan di DA-06, *review* RKA K/L

Tahun 2023 yang dilaksanakan sebanyak 2 kali. *Review* atas pencatatan aset jasa konsesi 79 ruas jalan tol. Selanjutnya, *review* rencana kebutuhan BMN dan terakhir adalah *review* tidak, *review* tidak terprogramkan berdasarkan permintaan unit organisasi seperti:

- Usulan revisi anggaran,
- Usulan kontrak tahun jamak, dan
- Usulan dana penanganan bencana.

Selanjutnya untuk pelaksanaan evaluasi berupa evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan BPIW.

Selanjutnya evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas terhadap *maturitas* penyelenggaraan SPIP di Kementerian PUPR.

- Pelaksanaan tela'ah sejawat eksternal atas penugasan dari asosiasi auditor internal Pemerintah Indonesia.
- Pelaksanaan tela'ah sejawat evaluasi kesiapan pembangunan Ibukota Negara.
- Evaluasi pembangunan bendungan.
- Evaluasi pengelolaan jalan tol.
- Evaluasi program infrastruktur koneksitas.

Pelaksanaan pembantuan berupa lanjutan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal. Pelaksanaan kegiatan pengawasan antara lain:

- Melanjutkan pendampingan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang mendukung acara internasional termasuk persiapan G20.
- Melanjutkan pendampingan penanganan bencana alam antara lain erupsi gunung berapi dan bencana lainnya.
- Pendampingan penerapan manajemen risiko dan penyelenggaraan SPIP terhadap unit organisasi di Kementerian PUPR dan melanjutkan seluruh kegiatan pengawasan yang berkelanjutan pada Semester pertama.

Selanjutnya, pelaksanaan pengawasan telah menghasilkan *output* pada Semester I Tahun 2022, status sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 berupa pengawasan audit dengan rencana jumlah pengawasan 166 kegiatan sudah dilakukan direalisasi sebanyak 184 kegiatan. Hal ini tambahan dari pelaksanaan pengawasan yang tidak terprogramkan dan mayoritas dilakukan di kantor antara lain:

- Audit dengan tujuan tertentu penelitian awal, dan
- Audit dengan tujuan tertentu verifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Sedangkan untuk pengawasan *review* dari rencana 132 *review* sudah direalisasikan sebanyak 162 *review*. Ini *review* usulan, *review* anggaran revisi anggaran, usulan dana penanganan bencana dan *review* usulan untuk kegiatan-kegiatan kontrak yang *multiyears*.

Evaluasi sudah dilakukan sebanyak 2 direncanakan sebanyak 22 rencana dan sudah dilakukan sudah terealisasi 18, karena ini masih di dalam terdapat laporan di dalam proses. Ini masih kita menangani pelaksanaan dari rencana evaluasi 22 kegiatan evaluasi. Untuk pemantauan, jadi 95 pemantauan sudah kita realisasikan sebanyak 179 pemantauan yang merupakan peningkatan *progres* permintaan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan akibat persyaratan *profiling* daripada pejabat.

Selanjutnya, pengawasan lainnya dari 51 rencana sudah direalisasikan sebanyak 88. Ini merupakan pendampingan administrasi dan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan dukungan infrastruktur acara Internasional G20 dan lain-lain. Untuk status saldo sisa rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Semester 2 Tahun 2021 adalah sebanyak 2.755 rekomendasi di mana sebanyak 2.220 rekomendasi belum sesuai dan sebanyak 535 rekomendasi belum ditindaklanjuti dikarenakan adanya pergantian pelaksana penanggungjawab, rotasi pegawai meninggal, perubahan nomenklatur kelembagaan, reorganisasi internal, dan lain-lain.

Sesuai dengan peraturan BPK RI Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 4 ayat (1) yang mengatur tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI harus diverifikasi terlebih dahulu oleh APIP. Dalam hal ini di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR yang telah dilakukan verifikasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada Semester 1 Tahun 2022 untuk 208 rekomendasi senilai 321,88 Miliar. Yang meliputi sebanyak 86 rekomendasi senilai 56,50 Miliar telah memadai, sebanyak 58 rekomendasi senilai 7,49 Miliar belum memadai dan sebanyak 68 rekomendasi senilai 257,88 Miliar masih dalam proses verifikasi.

Selanjutnya, upaya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Di Kementerian PUPR telah dilakukan sejak Tahun 2018 dengan hasil. Pada Tahun 2020 terdapat 1 unit kerja dengan predikat WBK yaitu Balai Teknologi Air Minum pada Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pada Tahun 2021, terdapat 2 unit kerja dengan predikat WBK yaitu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Jawa Tengah-DIY pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung pada Direktorat Jenderal Cipta Karya. Untuk Tahun 2022, terdapat 29 unit kerja yang masih dalam proses penilaian internal untuk diseleksi menjadi 8 unit kerja yang akan diusulkan kepada Kementerian PANRB sesuai dengan kebijakan Kementerian PANRB masing-masing kementerian/lembaga hanya dapat mengusulkan 8 unit kerja. Ini berbeda Bapak-Ibu Anggota bahwa ini kalau dulu kita terserah mengusulkan untuk 2022 ditentukan kuota pengusulan unit kerja yang akan diusulkan sebagai WBK di 2022.

Sejak Tahun 2019, Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pelaksanaan survei penilaian integritas di Kementerian PUPR. Dengan hasil pada Tahun 2019 dilakukan penilaian pertama di mana Kementerian PUPR memperoleh nilai indeks 74,38 nilai tersebut lebih rendah dari nilai indeks rata-rata nasional 76,98. Dan pada Tahun 2021 Kementerian PUPR memperoleh nilai indeks 82,64 nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata nilai indeks nasional sebesar 72,43%. Hal ini dapat

mencerminkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada Kementerian PU relatif sudah semakin baik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Inspektorat Jenderal terus bersinergi dengan Instansi seperti: pihak aparat penegak hukum, BPK, BPKP dalam rangka pengamanan proyek strategis kegiatan pendampingan acara internasional termasuk persiapan G20 dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan pengaduan masyarakat. BPKP dalam pelaksanaan audit bersama antara program PEN pasca bencana dan penanganan Covid 19 pengawasan P3DN dan lain sebagainya.

PPATK dalam pelaksanaan *profiling* atas calon pejabat struktur dan pejabat perbendaharaan. Sesuai dengan tema RKP Tahun Anggaran 2023 yaitu peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Inspektorat Jenderal berkomitmen melaksanakan pengawasan *intern* dengan fokus kepada tiga hal yang dituangkan dalam kebijakan pengawasan program kerja pengawasan Tahun 2023, yaitu:

1. Pengawasan penyelenggaraan infrastruktur Kementerian PUPR dengan tema pengawasan terhadap kegiatan direktif Presiden dan prioritas antara lain: Kegiatan pembangunan Ibu Kota Negara, pembangunan PSN, prioritas nasional, rehab dan rekon akibat bencana. Dan prioritas utama Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023 antara lain: Penyelesaian pekerjaan *multiyears contract*, pembayaran hutang pekerjaan, pembayaran eskalasi, program padat karya, serta pengawasan atas dukungan manajemen penyelenggaraan infrastruktur PUPR.
2. Pengawasan terhadap penatausahaan Barang Milik Negara di Kementerian PUPR dengan tema pengawasan terhadap perencanaan dan penatausahaan milik, Barang Milik Negara di seluruh unit organisasi Kementerian PUPR, termasuk pengawasan dalam tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian PUPR.
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan atas penyelenggaraan SBIP, penerapan manajemen resiko, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan, ketiga peningkatan kepatuhan dan integritas aparatur serta peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan.

Kronologis kronologi usulan Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut: Indikasi kebutuhan berdasarkan rencana strategis Tahun 2020-2024 adalah sebesar 129,9 Miliar. Indikasi kebutuhan berdasarkan perhitungan kerangka pengeluaran jangka menengah adalah sebesar 102,5 Miliar. Dan Pagu Indikatif berdasarkan surat Menteri PUPR Nomor KU0212-MN/780 tanggal 5 April hal usulan kebutuhan anggaran Kementerian PUPR senilai 102,5 Miliar. Dan, Pagu Indikatif berdasarkan hasil *exercise* internal Kementerian PUPR adalah sebesar 90,26 Miliar. Ini sesuai dengan yang disampaikan Menteri PUPR pada Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada tanggal 9 Juni 2022. Objek Pengawasan Tahun Anggaran 2023 merupakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal

dengan 184 auditor di seluruh wilayah kerja di Republik Indonesia. Terhadap pengolahan anggaran Kementerian PUPR senilai atau sebesar 98,20 Triliun. Yang dikelola sekitar 10 unit organisasi yang melalui 186 balai atau unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, untuk kegiatan rencana anggaran per jenis belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut: Di mana belanja pegawai dan barang sebesar 87,73 Miliar yang terdiri dari: Belanja gaji dan tunjangan pegawai sebesar 42,49 Miliar, belanja barang sebesar 45,24 Miliar, anggaran pengawasan *intern* senilai 35,54 untuk pelaksanaan audit *review* evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dan kegiatan pengelolaan pengawasan *intern* dan sebanyak 9,7 Miliar digunakan untuk operasional dan pemeliharaan prasarana perkantoran. Belanja modal sebesar 2,53 Miliar untuk pengadaan satu unit kendaraan dinas jabatan, pemutakhiran alat pengolah data dan komunikasi penunjang pengawasan, serta peremajaan prasarana perkantoran.

Selanjutnya, untuk pengelompokan rencana Pagu Anggaran tersebut konkrit dilaksanakan untuk pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu sebesar 11,21 Miliar, pelaksanaan *review* antara lain berupa *review* laporan keuangan, usulan rencana BMN, usulan RKA K/L, usulan revisi anggaran, usulan kontrak tahun jamak, usulan penggunaan anggaran penanganan bencana alam dan *review* tematik sebesar 1,5 Miliar.

Pelaksanaan evaluasi antara lain berupa: evaluasi SAKIP, evaluasi internal, reformasi birokrasi, evaluasi internal usulan zona integritas wilayah bebas korupsi, efektivitas penerapan manajemen risiko dan lain sebagainya senilai 3 Miliar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan permintaan unit organisasi sebesar 1,8 Miliar.

Pelaksanaan pengawasan lainnya berupa pendampingan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan sosialisasi bidang pengawasan sebesar 2,5 Miliar. Pelaksanaan kegiatan pengawasan wajib tingkat Kementerian antara lain: *review* laporan keuangan kementerian senilai 1 Miliar, kegiatan penelitian dan pengembangan pengawasan intern Kementerian PUPR sebanyak 3,3 Miliar.

Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia pengawasan senilai 5,7 Miliar. Pengadaan sarana internal sebesar 2,5 Miliar. Penyelenggaraan dukungan pengawasan berupa perencanaan *monitoring* evaluasi dan administrasi kegiatan pengawasan sebanyak 5,5 Miliar. Untuk pembayaran gaji tunjangan dan operasional perkantoran sebanyak 52,18 Miliar.

Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kiranya di dalam hal tentang rapat dengar pendapat yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal bisa memberikan, sangat mengharapkan arahan dari Bapak-Ibu, Pimpinan, Anggota yang terhormat. Mungkin demikian,

Wabillahi taufiq wal hidayah,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih, Pak Irjen.

Sebelum dilanjutkan saya ingin menanyakan dulu kepada para Anggota. Apakah sudah menerima menerima bahan materi rapat pada hari ini semua? Kalau sudah mungkin karena kami nanti siang juga ada Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perhubungan, maka kami harapkan sudah ada Kepala BP, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kami harapkan menyampaikan garis besar saja. Silakan kepada, Pak Rachman Arief.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA, M.Eng.):**

Baik terima kasih Pak Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Selamat pagi, dan
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Pimpinan Komisi V DPR RI,
Bapak dan Ibu Anggota Komisi V DPR RI,
Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR yang secara bersamaan mengikuti RDP ini,
Serta seluruh yang hadir pada acara RDP ini,

Semoga kita semua senantiasa dilimpahi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa.

Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi V, yang terhormat,

Sebagaimana undangan yang disampaikan kepada kami, izinkan kami melaporkan terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan rencana alokasi anggaran BPIW Tahun Anggaran 2023.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bahwa BPIW di bentuk berdasarkan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020. Yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pengembangan wilayah. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, kami dituntut untuk bisa melakukan komunikasi dan kolaborasi ke dalam bersama Direktorat Jenderal Teknis dan ke luar bersama

kementerian/lembaga terkait. Di antaranya adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, KLHK, Kementerian Pariwisata dan *stakeholder* terutama kami adalah Kementerian Bappenas.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Terkait kegiatan Tahun Anggaran 2022 untuk BPIW dari Pagu Kebutuhan sebesar Rp353,3 Miliar pada awalnya. BPW pada Tahun 2022 diberikan amanah sebesar Rp212,83 Miliar sesuai dengan Dipa awal Tahun Anggaran 2022. Kemudian, mengalami revisi satu akibat adanya *automatic adjustment* sebesar Rp6,5 Miliar yang disahkan melalui Dipa revisi 1 tanggal 14 Desember Tahun Anggaran 2021.

Kemudian terjadi revisi 2 BPIW yaitu berupa luncheon untuk kegiatan *integrated tourism development plan* sebesar Rp2,8 Miliar dan percepatan untuk iklan ITDP sebesar Rp 4,3 Miliar. Peluncuran dan percepatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan *market analysis* dan *demand assessment* untuk men-*support* ITMP di Borobudur, Prambanan dan Jogjakarta sebesar Rp3,3 Miliar. Dan, *market analysis* dan *demand assessment* untuk *integrated tourism master plan* di Pulau Komodo dan Labuan Bajo sebesar Rp3,9 Miliar.

Revisi ketiga BPIW berupa pergeseran Pagu Internal BPIW untuk pemenuhan penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp600.000.000 dari masing-masing satuan kerja ke layanan perkantoran di Sekretariat BPIW.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Dari alokasi sebesar Rp212,12 Miliar digunakan untuk dukungan manajemen sebesar Rp68,96 Miliar yaitu untuk gaji dan operasional, serta layanan manajemen masing-masing sebesar 51 Miliar dan Rp17,96 Miliar. Sedangkan untuk substansi pengembangan infrastruktur wilayah sebesar Rp151,16 Miliar. Terdiri dari rupiah murni sebesar Rp61,40 Miliar dan PHLN sebesar Rp89,76 Miliar. Terdiri dari *loan* ITDP sebesar Rp60,13 Miliar dan NUDP sebesar Rp29,63 Miliar. Sedangkan, untuk rupiah murni sebesar Rp61,4 Miliar digunakan untuk kegiatan sinkronisasi program, *monitoring* evaluasi, kemudian dokumen rencana, penyusunan kebijakan strategi, kepatuhan internal dan fasilitas panel ahli melalui kegiatan bantuan teknis. Sedangkan PHLN digunakan untuk kegiatan ITDB sebesar Rp60,13 Miliar dan *loan* NUDP sebesar Rp29,63 Miliar. Secara detail program kerja BPIW Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut, pertama adalah penyusunan dokumen rencana pengembangan infrastruktur wilayah sebesar 111,81 Miliar antara lain untuk rencana pengembangan infrastruktur wilayah di koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan di Sumatera bagian utara meliputi Kepulauan Batam, Bintan, Karimun. Di sini juga barangkali Bu Cen Sui Lan selalu berpesan terkait Pulau Penyengat Bu Cen Sui Lan, kami sudah tampung. Kemudian, juga koridor pertumbuhan.

KETUA RAPAT:

Pak Kepala Badan, judul-judulnya aja.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA, M.Eng.):**

Siap Bapak, baik Bapak.

KETUA RAPAT:

Capek Bapak nanti.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA, M.Eng.):**

Siap Bapak.

Kemudian untuk penyusunan RPW seluruh Provinsi, Pak, jadi nantinya kami ada dokumen RPW seluruh Provinsi yang akan memuat rencana pengembangan infrastruktur wilayah di Provinsi yang ada di Indonesia.

Kemudian untuk sinkronisasi program sebesar Rp8,38 Miliar, untuk panel Rp13,85 Miliar, kemudian telaah strategis wilayah sebesar Rp12,62 Miliar, kebijakan dan strategi sebesar Rp3 Miliar, kepatuhan internal Rp1,1 Miliar dan layanan dukungan manajemen sebesar Rp69,36 Miliar. Kemudian capaian pelaksanaan kajian yang sudah dicapai sampai dengan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 208 kawasan dari 249 kawasan. Kemudian juga Tahun 2022 kami lakukan kajian untuk sisanya, ya. Jadi kami masih sisa 21 kawasan yang akan kita laksanakan di Tahun Anggaran 2023.

Kemudian, terkait dengan *progres* pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 adalah sebesar 20,52%, untuk keuangan 20,53% untuk fisik. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 secara persentase lebih rendah, akan tetapi secara besaran uang penyerapan anggaran Tahun 2022 lebih besar dibandingkan Tahun Anggaran 2021. Hal-hal yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana upaya percepatan komponen-komponen PHLN di BPIW yang sampai dengan saat ini masih belum optimal.

Kemudian upaya-upaya percepatan yang kami lakukan adalah kami akan melakukan penajaman jadwal pelaksanaan kegiatan dan percepatan pelaksanaan perubahan standar operasional kegiatan. Kemudian percepatan pelaksanaan survei, FGD dan rapat koordinasi baik di level pusat dan daerah dalam rangka penyiapan rencana pengembangan infrastruktur wilayah. Kemudian melihat potensi anggaran yang tidak dapat di serap untuk dialihkan kegiatan lain yang lebih produktif. Kemudian upaya percepatan pelaksanaan dan penyerapan kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman dan hibah luar negeri yaitu kegiatan *integrated tourism development plan*. Serta percepatan pembahasan restrukturisasi kegiatan NUDP atau (National Urban Development Plan) bersama Bappenas dan Bank Dunia.

Kemudian kegiatan lainnya yaitu adalah bahwa kami sudah ada Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2022 yaitu tentang Perencanaan Dan Pemograman Pembangunan Infrastruktur PUPR. Di mana Permen ini berisi tentang perencanaan dan pemograman pembangunan infrastruktur PUPR yang ditetapkan pada tanggal 28 April 2022. Yang disusun sebagai amanat dari rencana aksi tindak lanjut kajian perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan antara tim KPK RI dengan Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Konstruksi dan BPIW Kementerian PUPR pada Tahun 2019. Permen ini akan mengatur tentang Ketentuan penambahan dan peraturan program infrastruktur PUPR yang berasal dari usulan kementerian/lembaga dan Instansi Pemerintah maupun aspirasi legislatif yang bukan menjadi kewenangan Kementerian PUPR. Namun dalam praktiknya menjadi terjadi dalam proses perencanaan dan pemograman.

Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan Rakor Bangwil di mana di bulan Februari 2022 kami sudah melaksanakan Rakor Bangwil. Ini merupakan rapat koordinasi keterpaduan, pengembangan infrastruktur wilayah yang merupakan *output* BPIW yang memiliki standar baik proses maupun tahapan yang menjadi media koordinasi antar sektor terkait. Terutama kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan wilayah yang didahului dengan penyiapan bahan mengenai kawasan-kawasan prioritas terpilih berdasarkan hasil kajian yang dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, Hankam dan kebencanaan. Dari Rakor Bangwil kami sudah menyeleksi dari 249 kawasan yang akan menjadi prioritas Tahun 2023 adalah sebanyak 112 kawasan. Di Sumatera dan Kalimantan sebanyak 38 kawasan, kemudian di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebanyak 27 kawasan dan di wilayah 3 Sulawesi, Maluku, dan Papua sebanyak 47 kawasan.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Izinkan saya menyampaikan hal yang senantiasa menjadi pertanyaan Bapak-Ibu yang saya hormati, yaitu terkait bagaimana BPIW melaksanakan periodisasi kawasan yang akan mendapatkan intervensi infrastruktur Kementerian PUPR sebagai berikut:

- 1) Pertama bahwa kawasan yang terpilih berpotensi memberikan manfaat dan dampak berganda atau *multiplier effect* bagi daerah belakangnya atau *hinterland*-nya. Contohnya adalah pengembangan kawasan industri yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan bahan baku yang berasal dari kawasan daerah sekitarnya.
- 2) Penuntasan masalah pada kawasan prioritas terpilih yang berdampak pada pemulihan dan atau peningkatan pelayanan skala regional. Contohnya dalam penanganan banjir rob di kawasan pantai utara Jawa Tengah. Terutama Kota Semarang yang dapat memulihkan layanan transportasi jalan, pelabuhan, kereta api dan bandara.
- 3) Program penanganan kawasan prioritas yang dipilih dapat dijadikan pembelajaran atau *best practice* untuk direplikasikan pada kawasan lain. Dilakukan dengan memilih kawasan dengan lingkungan strategis yang paling mendukung antara lain mendapat dukungan penuh dari Pemda dan masyarakat.

- 4) Kawasan yang terpilih memiliki nilai strategis secara nasional bahkan internasional contohnya sukses dan tidaknya pengembangan kawasan Borobudur sebagai salah satu warisan dunia yang akan mempengaruhi pandangan dunia kepada Indonesia.

Kemudian juga Bapak-Ibu, yang saya hormati,

Izinkan saya menyampaikan arahan Bapak Menteri kepada BPIW untuk dapat memberikan pertimbangan kepada beliau terkait dengan prioritas program PUPR, untuk memastikan bahwa program-program yang disusun dan dilaksanakan dalam program-program yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah. BPIW diharapkan dapat menjadi kolaborator dan integrator program di PUPR. Untuk itu BPIW akan senantiasa berkomunikasi dengan Dirjen teknis terkait dan juga K/L terkait untuk lebih memantapkan program PUPR. Untuk lebih menajamkan hasil-hasil rekomendasi dari kajian BPIW kami membuat standar produk BPIW yang kami namakan RPIW atau (Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah) yang diharapkan dengan adanya RPIW ini produk perencanaan BPIW akan mempunyai muatan standar yang strategis.

Kemudian, terakhir izinkan mohon maaf bukan terakhir, izinkan saya menyampaikan terkait dengan kegiatan 2022 yaitu terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim. Di mana kami di BPIW diminta untuk mendapatkan penugasan khusus dari Bapak Menteri PUPR terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Tahun 2021 ada 35 Kabupaten/Kota yang berupaya dientaskan kemiskinannya. Kemudian Tahun 2022 ada 215 Kabupaten/Kota, kemudian Tahun 2023 dan 2024 ada 514 Kabupaten/Kota. Diharapkan Tahun 2024 kemiskinan ekstrim akan menjadi 0% iya.

Kemudian kami melakukan evaluasi dari data-data BKKBN, dari data PK21. Di mana data BKKBN digunakan sebagai basis data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Jadi, kami dari BKKBN melakukan prioritas mana lokus-lokus yang harus kami sasar untuk bisa menjadi lokasi prioritas dari penanganan kemiskinan ekstrim dari setiap Kabupaten kami pilih 5 Kecamatan prioritas. Dari setiap Kecamatan prioritas kami pilih 2 Desa Kelurahan prioritas dan dari setiap desa kami pilih 5 RT/RW. Jadi, kami selanjutnya melakukan survei verifikasi dan validasi untuk kondisi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), kemudian sanitasi air bersih, dan kami juga mengecek kepemilikan dan kluster untuk integrasi.

Selanjutnya, kami akan melakukan integrasi atau *meddeling* terkait dengan integrasi antara kegiatan-kegiatan yang ada di Dirjen Perumahan dan Cipta Karya. Kemudian juga apabila tidak dimungkinkan integrasi hanya ditangani penanganan rumah tidak layak huni. Kemudian apabila hanya membutuhkan sanitasi juga akan melakukan intervensi sanitasi. Kemudian juga kalau hanya butuh kebutuhan air bersih kami tangani kebutuhan air bersih. Dan, apabila butuh akses jalan kami tangani kebutuhan akses jalannya. Jadi diharapkan nanti kita bisa mengintegrasikan program-program terkait dengan permukiman dan perumahan, sehingga menjadi contoh atau pola penanganan yang terintegrasi. Kami melakukan analisis prioritas lokus PKW pada 212

Kabupaten Kota untuk Tahun Anggaran 2022 dan akan dilanjutkan analisis prioritas untuk 514 Kabupaten Kota di Tahun 2023. Kami berharap program-program aspirasi Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI dapat diintegrasikan pada kawasan-kawasan tersebut.

Kemudian izinkan menyampaikan terkait dengan kronologis Pagu Anggaran 2023. Dari alokasi kebutuhan Rp367,90 Miliar, kemudian ada usulan Pagu Kebutuhan berdasarkan surat Pak Menteri PUPR adalah sebesar Rp257,3 Miliar. Rancangan awal Pagu Indikatif untuk BPIW adalah sebesar Rp163,38 Miliar. Berdasarkan pengalaman atau kondisi *loan* NUDP kami mengajukan untuk pengurangan Pagu *loan* NUDP dari Rp41,18 Miliar, ya, jadi kami harapkan ada alokasi *loan* NUDP yang berkurang. Kemudian proses anggarannya dari Rp163,38 Miliar. Terdiri dari dukungan manajemen sebesar Rp71,45 Miliar. Kemudian, untuk pengembangan infrastruktur wilayah sebesar Rp91,93 Miliar. Untuk pengembangan infrastruktur wilayah terdiri dari rupiah murni sebesar Rp50,75 Miliar dan pinjaman luar negeri sebesar Rp41,18 Miliar. Digunakan untuk sinkronisasi program, kemudian *monitoring* evaluasi, penyusunan dokumen rencana, penyusunan kebijakan dan strategi dan telaahan strategis kewilayahan.

Kemudian, secara detail kami lampirkan terkait dengan kebutuhan masing-masing kegiatan. Untuk penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah sebesar Rp10,10 Miliar, sinkronisasi program Rp12,10 Miliar, pemantauan dan evaluasi Rp16,55 nilai, telaahan strategis kewilayahan Rp12 Miliar, kemudian untuk belanja pegawai Rp29,5 Miliar, belanja barang operasional Rp22,5 Miliar, layanan manajemen Rp18,10 Miliar, kepatuhan internal Rp1,35 Miliar, kemudian belanja pegawai tadi sebesar Rp29,5 Miliar.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi V, yang hormati,

Di dalam dokumen lampiran kami sampaikan juga lampiran lokus-lokus kawasan prioritas yang sudah kami kaji dan sedang kami kaji di Tahun Anggaran 2022. Iya mudah-mudahan bisa menjadi catatan dari Bapak-Ibu semua. Demikian, yang dapat kami sampaikan, terima kasih dan selanjutnya kami mohon masukan dari Bapak-Ibu Anggota dan Pimpinan Komisi V DPR RI.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Rachman Arief Dienaputra, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Selanjutnya, kepada saudara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bapak Dr. Ir. H. Kholawi AH., MM., M.Si. silakan, Pak

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. H. KHOLAWI AH, MM., M.Si.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera buat kita semuanya,

**Yang saya hormati dan banggakan Pimpinan Pak H. Syaifullah Tamliha,
S.Pi., M.S.,
Bapak Roberth Rouw, dan
Anggota Komisi V yang saya cintai dan banggakan, serta
Hadirin yang saya muliakan,**

Izinkan menyampaikan cepat saja, karena tadi Ketua bilang cepat saja. Evaluasi Pelaksanaan APBN 2022 sampai dengan bulan Juni dan rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas Anggaran 2023. Langsung aja ke halaman 5, halaman 5 lanjut. Pagu Anggaran Usulan Pagu Indikatif adalah 566, kemudian alokasi anggaran yang sesuai surat Menteri Keuangan tanggal 4 Oktober adalah 350 termasuk *auto adjustment* sebesar 20 Miliar.

Lanjut. Ini adalah postur anggaran dari (**suara kurang jelas**) 65% untuk belanja barang, kemudian belanja pegawai 24% dan belanja modal 10%. Lanjut, *progres* BPSDM untuk fisik 40,49%. Sedangkan keuangannya 37,90%. Lanjut, capaian *output* kegiatan 2022 ada tiga tugas pokok di BPSDM yaitu pengembangan talenta, ini untuk pemantauan kinerja sudah 84%. *Nah*, untuk pelatihan sudah mencapai 75% dan pendidikan untuk magister super spesialis sudah 77% dan D3 vokasi Politeknik 71%. Lanjut, ini capaian pelatihan kurang lebih dari target 5.220 sudah mencapai 76%, dengan nilai hasil evaluasi kelulusan dan tingkat pemahaman peserta pasca pelatihan sekitar 80 nilainya sudah kategori baik.

Lanjut, ini Pagu unit kerja lanjut aja, lanjut. Ini pelatihan untuk CPNS baru yaitu yang baru saja dilakukan dengan Kopassus di Batujajar, Bandung. Pak Menteri sempat membuka dan menutup pelatihan ini, dari total 1.056 CPNS dibagi 12, lanjut. Program ini program magister super spesialis. Jadi, Kementerian PUPR mempunyai 2 program untuk pendidikan lanjutan, ya bagi ASN PUPR untuk mengembangkan *knowledge* dan kapasitasnya. Yaitu dengan untuk dalam negeri untuk APBN itu melalui program magister super spesialis. Ada Universitas teknis ada empat yaitu UGM, ITB, UNDIP, dan ITS. Ini mulai Tahun 2020 sudah lulus 133 orang dan dari sekian lulusan kurang lebih 50%-nya adalah *cumlaude* dan yang belum ada 26. Sedangkan, untuk 2021 sama ada 155 orang, 4 perguruan tinggi masih berjalan. Sedangkan untuk 2023 ada tambahan program non-teknis ada 5 Universitas. Yaitu ada di Universitas Bung Hatta, Hasanuddin, Unand Padang, Binus, dan UI totalnya ada 78 orang.

Lanjut. Ini Politeknik di Semarang kita punya pendidikan vokasi Politeknik di Semarang sejak Tahun 2018, ini sudah ada 3, 3 Prodi yaitu: D3 Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, D3 Teknik Konstruksi Bangunan Air dan D3 Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan. Jadi, sudah rencana wisuda pertama tanggal 3 September, di sini beda dengan Politeknik lain karena 60% praktek dan 40 teori. Kalau Bapak-Ibu yang terhormat Anggota Dewan ada keponakan ada teman-teman di daerah mungkin yang tamatan SMA, ya mungkin, bisa dilanjutkan ke Politeknik PU di Semarang. Lanjut, ini totalnya sudah 416 ada 3 Prodi.

Lanjut. Untuk kerja sama luar negeri, Pak Menteri hanya membolehkan melalui beasiswa LPDP. Yaitu beliau memberikan arahan tahun ini rekrutmen minimal 100 orang, minimal. *Alhamdulillah* di tahap pertama sudah lolos dari seleksi ada 38, tahap 2 *Insyallah* bulan Juli moga-moga bisa tercapai 100%. Selain itu juga ada kerja sama dengan Pemerintah lain yaitu Australia, Jepang dan Korea, untuk pendidikan pasca sarjana. Lanjut. Ini sebarannya dari Prancis, Amerika, Portugal, Itali, UK, Jepang, Australia, dan Belanda. Kalau dalam negeri ada Jakarta, Bandung, Jogjakarta, dan Makassar.

Lanjut. Ini kerja sama dengan Pemerintah Hongaria kita diberi kesempatan untuk mengirimkan, untuk mendekati Doktoral, program Doktoral untuk Dosen di Politeknik. Kita *ngirim* 3 orang namun untuk selanjutnya tahun depan akan mengirimkan lulusan daripada Poltek untuk bisa magang di industri, perusahaan industri di Hungaria. Lanjut. Ini pelatihan *short course* di Korea Selatan juga akan mengirimkan 25 orang tanggal 17 Juli, berangkat ke sana. Lanjut. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan IT bagi ASN PUPR kita kerjasama dengan Yayasan Purwadhika yaitu *Technology School* di Sinarmas Land BSD. Kita sudah melakukan 2 program yaitu adalah sains dan UI/UX *design* dan tanggal 28 ini besok akan dibuka *web development*, totalnya 70 orang.

Lanjut. Ini rencana untuk Anggaran 2023. Lanjut ini Anggaran BPSDM sejak 2019, 2021 sempat 563 usulannya kemudian *eh* dibawa, di Pagu Indikatifnya 407. Dan untuk 2022 turun menjadi 150 dan 23 naik tapi untuk ke politeknik tambahannya. Lanjut. Ini yaitu Anggaran Pagu 2023, 376.488.585. Lanjut, Ini Pagu Indikatif BPSDM untuk dukungan manajemen kurang lebih 287 dan program vokasi pendidikan Poltek 89. Lanjut, prioritas penanganan untuk 2023 tidak jauh beda dengan 2020 anggarannya juga sama, hanya ada penambahan di Poltek 120 Miliar. Lanjut. Ini target mungkin tadi ada kesalahan kita udah perbaiki. Targetnya hampir sama dengan tahun lalu karena uangnya juga sama, jadi tidak jauh beda.

Lanjut, ini rancangan kegiatan BPSDM untuk mengembangkan talenta, pengembangan kompetensi bidang SDA dan pemukiman, pengembangan kompetensi jalan perumahan dan BIW serta pengembangan kompetensi bidang manajemen serta pendidikan dan dukungan manajemen internal. Lanjut, ini rencana target untuk 2023 hampir sama cuman beda 30 orang. Lanjut, ini program magister super spesialis sama kita akan juga kurang lebih 600 orang kita akan menerima lulusan SMA untuk bisa ikuti pendidikan di Poltek (**suara kurang jelas**) dari 9 perguruan tinggi. Lanjut.

Terima kasih kira-kira itu yang dapat saya sampaikan mohon arahan dan masukannya dari Bapak Pimpinan dan Anggota dewan yang saya hormati.

Terima kasih,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya sebelum saya lanjutkan yang paling menarik *tuh* dari Pak Sekjen, memantau 541 DAK. Saya *nggak* tahu apakah DAK ini dibahas di Komisi di sini atau di tempat yang lain. Iya diawasi di sini, ini perlu kita pikirkan bersama, Pak Dewo. Kemudian, aspirasi dengan sistem *online*, di meja Pimpinan sudah ada 3 orang yang ingin menyampaikan respon terhadap paparan yang disampaikan oleh para Eselon I. Yang pertama Bapak Ali Mufthi Fraksi Partai Golkar, silakan, Pak.

F-P. GOLKAR (DR. H. ALI MUFTHI, S.Ag., M.Si.):

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi V beserta Anggota Komisi V DPR RI,
Yang saya hormati Bapak Sekjen beserta seluruh jajarannya,**

Terima kasih Pimpinan atas waktunya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tentu beberapa hal itu terkait dengan pertama tentang format penyampaian. Kalau tidak salah Presiden Republik Indonesia itu berkali-kali menyampaikan ke publik bahwa *paper* dari masing-masing kementerian/lembaga maupun Pemerintah yang lain itu bagaimana bisa dibaca dengan baik oleh siapapun, ringkas, padat dan tentunya itu bisa memudahkan semua pihak untuk memahami dan tentunya yang terakhir adalah hemat, hemat anggaran. Saya *nggak* bisa bayangkan model seperti ini terus itu biayanya berapa, terus sebenarnya arti urgensinya untuk kepentingan Indonesia masyarakat itu seperti apa. Ini yang berkali-kali perlu disikapi secara baik agar *paper* ini tidak sia-sia. Kalau Bapak hanya menyampaikan oh di kesekjenan itu hanya Biro ini ini, uangnya begini begini begitu, itu kan sebenarnya cukup dengan yang sederhana-sederhana aja, Pak, tidak perlu yang semewah ini mewah sekali kalau itu banyak eksemplar, tentunya uangnya itu bisa banyak. Padahal sisi lain kita ini menyampaikan aspirasi masyarakat itu sangat susah karena uangnya semakin turun dari tahun ke tahun. Itu yang pertama

Yang kedua Pak Sekjen DAK tadi itu saya tertarik, bisa *ndak* Pak Sekjen ini men-*declare gitu* ya, DAK itu seperti apa sih jenis kelaminnya yang ada yang akan datang ini, di mana saja itu di seluruh Kabupaten Kota, Provinsi. Saya ingin tanya DAK di Dapil saya bagaimana itu Pak Sekjen, bisa *nggak* kita ini

nambah usul *gitu*. Ya, walaupun nanti Pak Sekjen ini mengkoordinasikan dengan Direktur Jenderal yang lain tapi yang penting kan ini DAK ini penting. Karena setiap kami kita saya ke Dapil itu yang menjadi persoalan masyarakat secara keseluruhan ada persoalan infrastruktur. Baik jalan, irigasi, Embung, macam-macam yang dibutuhkan, termasuk persoalan-persoalan rehab SD, MI, infrastruktur olahraga yang itu tentunya semua ada di Kementerian ini.

Nah, tentunya Pak Sekjen ini penting DAK 2023 atau '22 ya *nggak* tahu sudah lewat mungkin. Ya kami dikasih tahulah khususnya masing-masing Dapil ini bisa nambah-nambah atau *gimana*, bukan nambah dalam pengertian negatif tapi positif. Karena kita *kepingin*, kami ini kan melaksanakan kegiatan reses, ada kundapil macam-macam itu banyak aspirasi yang masuk. Tetapi bagaimana aspirasi itu bisa ter-cover secara baik *nah*, itu kan harus disinkronkan dengan apa yang menjadi prioritas oleh Pemerintah. Jadi Pemerintah punya skala utama kami juga punya aspirasi yang mekanismenya juga dilindungi oleh undang-undang.

Untuk Pak Inspektur Jenderal, saya mengapresiasi berbagai macam capaian, Pak. Karena Inspektur, Inspektorat, kalau di daerah itu Inspektur Jenderal ini adalah palang pintu untuk menjaga integritas dari Aparatur Sipil Negara yang ada di negara kita ini. Kalau Institusi Pemerintah itu buruk, ya, itu yang kita salahkan itu ya tentunya Inspektur ini. *Nah*, cuma tadi Pak *paper* Bapak ini *nggak* ke baca secara akademik *nggak* kebaca. Bapak hanya menyampaikan kita audit itu bisa 185, kita *review* hanya sekian, yang kita ini kan juga sekolah, Pak. Secara akademik kita diajari *input*, *output*, *outcome*, itu ya ini Bapak melakukan audit itu ya, itu sebenarnya bisa *ndak* meningkatkan kinerja dari Aparat Sipil Negara ini Pak. Karena esensi dari sebuah audit itu adalah ada peningkatan kinerja dari Aparat Sipil Negara yang ada di masing-masing Kementerian atau Departemen ini. Kinerja baik kinerja yang sifatnya itu produktivitas apa ASN maupun produktivitas capaian ya produktivitas capaian.

Nah, oleh karena itu saya memandang Pak Inspektur ini penting sekali Inspektur ini betul-betul menyampaikan hasilnya itu kepada kita ya kepada kita karena regulasi yang ada sekarang ini sebenarnya APH pun itu punya ketergantungan yang cukup kepada Institusi ini *gitu* Pak pada Inspektur ini. *Nah*, oleh karena itu kami mohon saya minta, Pak, 185 audit, ada *review*, ada apa tadi, itu naskahnya bisa di-*share* ke kita *gitu* ya, apa *sih* masalah auditnya itu. Apakah masalah audit kinerja, apakah masalah audit penggunaan anggaran atau audit apa ya, itu bisa *ndak* itu kita bisa minta dokumen itu. Karena itu kita bisa men-*support* Bapak bukan kita tidak punya niat baik, *nggak* punya niat jelek Pak, Kita ini membantu kebaikan-kebaikan ini ya ingin membantu kebaikan-kebaikan.

Yang ketiga berkaitan dengan BPIW itu, Pak saya ini punya cara pandang begini Pak. Terkait dengan antara sinkron antara Dapil dan skala utama tadi yang Bapak sampaikan. Apakah produk *bottom up* atau perencanaan *planning* yang dilakukan oleh Kementerian dengan Reses yang dilakukan Kundapil yang dilakukan oleh Anggota DPR itu bisa di bentur-benturkan. Bisa *nggak* Pak itu disinkronkan *gituloh*, jadi sehingga kita *uenak* Pak. Kalau dibenturkan itu kan *wo* aspirasimu *tuh* *nggak* sesuai dengan skala

utama Pemerintah itu namanya dibenturkan Pak. Padahal masing-masing nomenklatur ini Pak itu dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Perencanaan Nasional maupun Undang-Undang tentang tentang Susduk (sumpah jabatan). Itu juga mengatakan bahwa kita ini punya kewajiban secara konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi dari pada masyarakat di daerah pemilihan.

Nah, oleh karena itu saya meminta kami dengan Bapak itu jangan dibenturkan. Kita itu saling memberikan *support* biar apa yang Bapak sampaikan direncanakan dengan yang kami terima dari masyarakat ini bisa sinkron. Kami ini hanya butuh masyarakat *oh* Bapak jadi Anggota Dewan itu bisa memperjuangkan aspirasi kami hanya begitu aja Pak intinya. Tapi kalau kami ini *nggak* bisa memperjuangkan apa-apa baik menjadi aspirasi masyarakat melalui mekanisme Reses, mekanisme apa begitu, kita ini dikatakan Bapak ini kan Anggota Dewan mungkin hanya duduk duit apalagi itu ya kalau bisa ya jangan begitu Pak. Terima kasih Pak Pimpinan kurang lebihnya mohon maaf.

Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Sudewo, tapi sebelum Pak Sudewo, Bu Cen Sui Lan silakan, Bu Cen.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Komisi V,
Yang saya hormati dari Kementerian PUPR,
Ada Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Kepala BPIW, dan Pak Kepala BPSDM Pak
Khalawi, teman saya,**

Saya langsung aja Pak Kepala BPIW. Terima kasih karena Pulau Penyengat sudah dalam tahapan penataan, jadi sudah dalam pengerjaan. Juga yang mengenai kemarin saya telepon mengenai program yang harus disesuaikan dengan daerah ekstrim itu sudah ada SK-nya. Jadi, Pak Kepala terima kasih tapi ada yang saya mau minta lagi Pak Kepala yaitu di Kabupaten Lingga penataan Istana Raja itu adalah peninggalan bersejarah harus kita jaga karena itu saya minta tolong dimasukkan di dalam anggaran 2023 agar bisa disurvei dan dilaksanakan, tolong Pak Kepala itu dimasukan. Disana juga banyak peninggalan bersejarah berupa makam-makam raja yang memang perlu penangan.

Yang kedua kepada Pak Irjen. Pak Irjen saya melihat Pak Irjen ini kan menindaklanjuti hasil dari BPK benar, ya, hasil dari internal dari BPK. Saya ingin menanyakan itu di Batam tidak bisa masuk program-program Bina Marga karena ada permasalahan lahan yang tidak diserahkan oleh Kepala Daerah,

oleh BP Batam atau bagaimana, sehingga terjadi temuan di BPK terus, dan saat ini Bina Marga tidak bisa memberikan, memberikan program. Anggaran sudah ada terkendala dengan hal-hal tersebut tidak bisa dilanjutkan program-program jalan. Saya cuma ingin menyampaikan jangan karena permasalahan itu masyarakat dirugikan karena itu hak dari masyarakat, saya mewakili masyarakat. Saya *nggak* bisa dipertentangkan bagaimana mencari solusinya berkali-kali saya telepon kepada Bina Marga *nggak* ada solusi. Itu tugas dari PUPR bagaimana menyelesaikannya, saya tidak mau kami ini menderita. Jadi, tolong dicarikan bagaimana solusinya apa yang harus dilaksanakan. Jangan alasan-alasan itu membuat anggaran itu tidak bisa masuk ke daerah kami, itu tolong dibantu, Pak.

Juga Pak Sekjen,

F-P. GOLKAR (DR. H. ALI MUFTHI, S.Ag, M.Si.):

Jangan marah-marah, jangan marah-marah.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Harus, sudah berkali-kali itu. Pak Sekjen saya kemarin ada titip tolong disampaikan, tolong dibantu supaya program itu bisa dilaksanakan mengenai krematorium ya Pak Sekjen ya, itu tanggung jawab Pak, ya, saya bakalan kejar terus.

Kalau Pak Khalawi,, saya melihat ini ada sebaran spesial karya wisata. Jadi tadi saya sudah bicara dengan Pak Suki udah banyak dapat laporan, mungkin banyak teman-teman yang *nggak* tahu bahwa kita ini bisa mengajukan untuk siswa-siswa. Ke depan mungkin kita-kita ini akan mengajukan beberapa untuk calon beasiswa dan lain-lain. Terima kasih itu saja, Pimpinan, sekian dari saya terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini *nggak* marah-marah, iya kalau Bu Cen itu memang intonasinya, Pak tinggi. Jadi satu-satunya yang bagus suara Bengawan Solo *tuh* cuma Bu Cen ini. Silakan Pak Sudewo

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Terima kasih.

Asssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

**Pimpinan dan semua Anggota kawan Komisi V yang saya hormati,
Kepala BPSDM, Sekjen, Irjen, Kepala BPIW dengan seluruh jajarannya
yang saya hormati,**

Saya mungkin lebih *soft* dari pada Bu Cen Pimpinan, karena memang karakter saya seperti itu. Kalau Bu Cen ini nadanya tinggi suka marah begitu kalau saya lebih *soft gitu*. Tapi meskipun begitu saya juga terima kasih sama Bu Cen, karena itu adalah representatif kami *gituloh*. Kami tidak ingin dikecewakan oleh Kementerian PUPR lagi, syukur Bu Cen menyuarkan saya terima kasih *gitu*.

Kepada Sekjen, Sekjen ini punya tanggung jawab yang berat sesungguhnya ya. Sekali lagi saya menyampaikan punya tanggung jawab yang sangat berat, oleh karena semua nafas, gerak, dan kegiatan kementerian PUPR yang dijabarkan di masing-masing Direktorat itu dalam kontrol monitor pengendalian pengawasan oleh Sekjen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan ya. Jadi apakah itu sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR atau tidak. Tolak ukurannya seperti apa kalau memang itu sudah dilaksanakan *gitu* ya. Jangan sampai Sekjen asyik membuat suatu perencanaan, membuat suatu program, membuat suatu kegiatan, tetapi itu sebenarnya tidak ada korelasinya dengan apa yang terjadi dalam dinamika Direktorat-direktorat. Sudah ada sekian puluh Biro, sepuluh atau sebelas Biro begitu ya. Itu artinya segala sesuatu yang akan yang terjadi di Direktorat maupun unit-unit Kementerian PUPR itu berada disana *gitu*.

Yang menarik salah satu Biro itu adalah analisis kebijakan publik. Saya ingin tahu dari Sekretariat Jenderal, analisis kebijakan publik itu apakah terkait dengan kebijakan publik yang merupakan dasar peraturan perundang-undangan di Kementerian PUPR ya yang dipedomani oleh Kementerian PUPR atautah kebijakan publik itu segala sesuatu yang menjadikan produk Direktorat-direktorat itu juga atautah semua yang terkait dengan produk Kementerian PUPR itu merupakan ruang lingkup kewenangan yang harus dianalisis oleh Sekretariat Jenderal *gitu* ya. Melihat kejadian atau kenyataan di lapangan banyak sekali hal-hal yang perlu mendapatkan satu evaluasi tetapi itu terjadi berulang kali tanpa ada penyempurnaan, tanpa ada evaluasi. Lantas yang dikatakan Sekretariat Jenderal melakukan analisis kebijakan itu yang mana *gitu* ya salah satu contoh ini saya katakan.

Dalam rapat kerja dengan Kementerian PUPR saya sudah menyinggung, wujudkanlah ekosistem konstruksi yang baik, ekosistem konstruksi. Segala hal yang terkait dengan konstruksi semua unsur yang terkait dengan pelaksanaan konstruksi itu harus merasa *happy*, merasa baik dalam koridor peraturan perundang-undangan tidak ada yang dirugikan. Pemerintah tidak rugi, swasta yang melaksanakannya tidak rugi, semua yang terkait dengan pada saat pelaksanaan konstruksi itu tidak ada yang dirugikan tidak ada yang dikorbankan begitu. Sampai warung-warung kecil dalam penyediaan pembangunan konstruksi itu pun juga harus itu merupakan suatu ekosistem satu konstruksi. Yang terjadi di lapangan adalah anggaran ini milik Pemerintah, anggaran ini milik negara, anggaran ini milik negara. Yang punya anggaran siapa? rakyat. Yang melaksanakan siapa? Pemerintah. Untuk mengelola anggaran ini supaya efektif dan efisien, efektif dan efisien.

Kemudian pelaksanaan anggaran ini itu adalah berada kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak-kontrak yang dijalankan. Kenyataan di lapangan

pelaksana di lapangan itu, kontraktor kontraktor itu ya, itu berjalan sendiri berjalan secara *happy*, secara *enjoy* seolah-olah ini memutus mata rantai antara Pemerintah dengan kontraktor ya. Seolah-olah memutus mata rantai antara kontrak antara Pemerintah dengan kontraktor. Dinamika segala sesuatu yang terjadi disana itu Pemerintah kayaknya tidak melakukan apa-apa, ini juga termasuk Pak Irjen ya. Karena salah satu tugas pokok Pak Irjen tadi disampaikan pengawalan pembangunan infrastruktur, ini esensial sekali. Pengawalan pembangunan infrastruktur itu berarti pengawalannya adalah secara melekat. Tadi disampaikan secara direktif, strategis, maupun operasional. Berarti dalam tataran kebijakan operasional maupun sampai teknis itu istilah pengawalan. Bukan hanya sekedar pengawasan atau *monitoring* tetapi pengawalan adalah pengawasan yang lebih ketat dan produk dari pada pengawalan ini yaitu terwujudnya ekosistem konstruksi yang sangat baik. Analisis kebijakan dan pengawalan pembangunan konstruksi ini kalau memang betul dilaksanakan secara sungguh-sungguh ya dari mulai kebijakan operasional sampai teknis, ini produknya sangat luar biasa. Apa produknya? kualitas konstruksi yang sangat bagus yang sangat bagus, kualitas konstruksi akan betul-betul sesuai dengan spek.

Saya kembali lagi kepada yang saya sampaikan tadi bahwa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor ini, inilah yang tidak ada pengawasan, tidak ada pengawalan secara sungguh-sungguh secara *real* oleh Kementerian PUPR. Apakah itu oleh Direktorat oleh Dirjen oleh Sekjen dalam analisis kebijakan atautkah dalam Irjen. Karena kenyataan yang ada disana bahwa pelaksanaan di lapangan itu sudah tidak sesuai lagi dengan semua persyaratan yang harus dipenuhi ketika dilakukan pelelangan konstruksi. Pelelangan konstruksi itu sangat detail baik syarat metode pekerjaannya, baik peralatannya, baik bahan bakunya itu secara detail. Tapi apakah pada saat pelaksanaan ini sesuai dengan persyaratan itu? ternyata tidak sama sekali dibidang sama sekali tidak. Lantas apa gunanya, lantas apa gunanya melakukan evaluasi secara detail terhadap semua persyaratan itu kalau di lapangannya tidak dijalankan, lantas apa gunanya.

Yang lebih mengerikan, lagi yang lebih mengerikan lagi. Ketika Pemerintah sudah memenuhi kewajibannya membayar uang dalam jumlah tertentu sesuai dengan termin tertentu, uang itu tidak digunakan untuk langsung membayar kepada subkon-subkon, sub konstruksi sub konstruksi itu tidak langsung. Bahkan dibuat persyaratan ini SCF, dibuat persyaratan ini SKBD, sekian bulan baru dibayar ya. Ini fungsi pengawalan fungsi Irjen pengawalan pembangunan infrastruktur tolong ditingkatkan. Sekjen dalam analisis kebijakan tolong itu, kepatuhan tolong ditingkatkan, sangat mengerikan sangat mengerikan. Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, subkonstruksi diperbolehkan saja tidak ada masalah. Tapi ada batasannya subkon itu pekerjaan mana yang disubkonstruksikan itu ada batasannya. Mungkin pekerjaan itu yang bersifat spesifik, bersifat kekhususan, di mana *main* kontraktor itu tidak bisa mengerjakan. Itulah subkon kan kepada pihak ketiga yang lain karena memang itu kebutuhan secara spesifik terkait dengan teknologi atau terkait dengan sumber daya manusia. Tapi kenyataan di lapangan apa, semua pekerjaan di subkon, semua pekerjaan di subkon dengan

target sekian persen. Kalau anda mau 50%, anda mau 60% jalankan kalau tidak saya tawarkan yang lain hancur pekerjaan.

Juga masukan kepada Kepala BPSDM, yang sangat lemah dalam Kementerian PUPR adalah sumber daya manusia perencanaan. Sumber daya manusia perencanaan, mana mungkin dia bisa melakukan satu perencanaan dengan harga satuan tertentu ya kan tapi pengerjaannya di lapangan maksimal hanya 60% tapi *toh* itu bisa berjalan, masih bisa berjalan. Tapi tidak tahu risikonya 5 tahun 10 tahun daripada konstruksi itu akan seperti apa. Kalau jalan risikonya meskipun itu menjadi rusak waktu perencanaan waktu pelayanan jalan menjadi lebih pendek tidak begitu besar risikonya, tetapi kalau bendungan risikonya sangat lebih besar. Bendungan menjadi jebol mungkin 100 tahun atau 200 tahun yang akan datang menjadi jebol kita semua sudah tidak ada, tetapi kita bisa *mengklaim* bahwa bendungan yang kita bangun sekarang itu kualitasnya bagus tapi bagaimana 200 tahun yang akan datang kalau bendungan itu jebol akibat daripada yang kita lakukan sekarang ini. Jangan dianggap bahwa ini tidak beresiko dari segala yang kita lakukan, ya. Apakah Pemerintah tahu Kementerian PUPR selama ini tahu saya anggap tahu, tapi mengapa itu dibiarkan *gitu* kan.

Maka pentingnya ini Pak Sekjen, Pak Irjen, melakukan pengawasan melekat. Saya yakin kementerian PUPR tidak menghendaki hal yang semacam ini saya yakin tidak. Saya tidak yakin Kementerian PUPR akan dengan sengaja membuat kualitas pekerjaan itu tidak baik saya yakin tidak. Tapi saya mengingatkan bahwa yang terjadi seperti itu perlu mendapatkan perhatian dari Kementerian PUPR. Pak Menteri PU saya yakin tidak menginginkan itu terjadi, karena Pak Menteri PU juga mengeluarkan Peraturan Menteri atau SK Menteri itu tentang evaluasi di mana pelelangan penawaran di bawah 80% itu bukti bahwa tidak menginginkan seperti itu tapi kenyataan yang terjadi di lapangan jauh dari pada, ini perlu adanya perhatian dari Sekjen dan Irjen.

Tentang Undang-Undang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Jalan, saya ingin mendapatkan penjelasan lagi dari Sekretaris Jenderal. Sudah 2019 diundang-undangkan sumber daya air itu, tapi sampai sekarang belum ada aturan di bawahnya yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR meskipun itu berupa Peraturan Menteri. Padahal kalau saya baca Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ini, itu isu-isu tentang Undang-Undang SDA itu sangat bagus sekali dan itu bilamana dilaksanakan akan memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan perekonomian bangsa dan negara tapi satupun tidak disengol, *gituloh*. Dalam pemaparan Sekjen juga tidak ada satupun yang disampaikan. Kemarin saya tanyakan di awal sampai sekarang paling tidak adalah *progres* dari Kementerian PUPR.

Termasuk Undang-Undang tentang Jalan jangan sampai Undang-Undang tentang Jalan, nasibnya disamakan dengan Undang-Undang SDA. Tentang jalan itu saya keliling ke mana-mana itu hancur pembangunan daerah. Termasuk yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi ada pembinaan atau pengawasan soal sinkronisasi pembangunan infrastruktur daerah dan pusat. Ini wujudnya apa, wujudnya apa, *outcome*-nya yang kita rasakan bahwa betul pembangunan infrastruktur daerah dan pembangunan infrastruktur pusat itu

punya visi punya misi yang sama jangan sampai timpang begitu. Kalau kita hanya fokus terhadap pembangunan jalan nasional kemudian jalan daerah Provinsi maupun Kabupaten yang sifatnya *connectivity* dan juga punya nilai-nilai strategis itu tidak diperhatikan juga tidak akan ada manfaat yang begitu signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa *gituloh*, jadi ini perlu dijelaskan oleh Sekjen

Yang menarik juga tadi yang disampaikan oleh Pak Tamliha, DAK melakukan pengawasan terhadap DAK. DAK itu tidak pernah dibahas di sini tapi Kementerian PUPR sebagai mitra kami ternyata melakukan hal itu ya. Mengapa melakukan semuanya itu tetapi kita tidak tahu, ya kan, kami tidak tahu, tidak pernah dibahas di sini tidak pernah dikonsultasikan di sini, jadi saya ingin mendapatkannya. Jadi saya berharap semua unit kerja di Kementerian PUPR itu jangan asik menyusun program tapi tanpa melihat realita pelaksanaan konstruksi di lapangan. Ini pun juga nanti akan saya sampaikan dengan Dirjen-dirjen termasuk juga kepada Irjen.

Pak Irjen, jalan tol di Kayu Agung itu ya yang semula punyanya Sriwijaya pemilik saham ya, pemilik saham. Kemudian dibeli oleh Waskita Karya itu indikasinya terjadi sesuatu pertanyaan besar. Bagaimana dia memiliki saham kemudian hanya melaksanakan konstruksi yang kurang lebih hanya 5% ya dalam kondisi di mana dia tidak punya kemampuan apa-apa. Pelaksanaan konstruksi dengan kualitas yang sangat buruk lantas dibeli oleh BUMN kita dengan harga yang sangat fantastis bisa tiga kali lipat itu kita hitung. Mengapa hal ini bisa terjadi, Kementerian PUPR-nya bagaimana, Dirjennya bagaimana. Ini ditengarai menjadi suatu persoalan yang lebih besar daripada yang saya sampaikan itu. Mengapa hal ini seperti itu dan banyak sekali ruas-ruas jalan tol yang indikatornya akan menjadi persoalan besar.

Saya ingin juga kepada Pak Irjen, jadi Barang Milik Negara. Barang Milik Negara ini mana yang sekiranya dimanfaatkan betul oleh Kementerian PUPR ya, yang itu tidak dibiarkan begitu saja tetapi menjadi Barang Milik Negara yang produktif. Sekjen ini juga dalam Barang Milik Negara Kementerian PUPR itu banyak sekali. Mengapa itu tidak, tidak perlu saya sampaikan satu persatu.

Termasuk kepada BPIW, BPIW ini sebenarnya sangat diharapkan kehadirannya tapi eksistensinya itu sangat memprihatinkan itu. Syukurlah terbit Peraturan Menteri nomor berapa itu tadi tanggal 28 April Tahun 2022 yang seolah-olah mengharuskan hasil kerja BPIW itu harus ditindaklanjuti dalam bentuk perencanaan maupun program di masing-masing Direktorat. Tolong dijelaskan hal ini Pak yang dimaksud Permen ini apa *gitu* dan apabila tidak dilakukan ya kan oleh masing-masing Direktorat kira-kira ada sanksi apa. Dan teknis teknis atau mekanisme, mekanisme supaya betul-betul bahwa apa hasil daripada BPIW itu dilaksanakan oleh masing-masing Direktorat itu dijalankan itu mekanismenya seperti apa? Jangan sampai BPIW ini retorika *gituloh*, kalau memang retorika kan tidak perlu ada ada unit semacam ini. Apa lagi sekarang ini di *grounded* kewenangannya BPIW, kayak seolah-olah tidak punya kewibawaan tidak punya martabat, ya. Suruh ngurus kemiskinan ekstrim, ini apa? Apa-apaan *gitu* BPIW yang sifatnya adalah infrastruktur wilayah kajian infrastruktur wilayah yang sifatnya adalah regional yang strategis untuk

kepentingan tertentu tapi di *grounded* untuk kemiskinan ekstrim. Ya, kalau memang BPIW ini tidak perlu.

KETUA RAPAT:

Bisa dipersingkat, Pak Dewo.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Siap. BPIW ini tidak perlu lebih baik tidak usah jangan di *grounded* semacam ini. *Nah*, ketika ini infrastruktur kemiskinan ekstrim bukan sifatnya wilayah lagi untuk kemiskinan ekstrim tapi orang, Pak *gitu* ya, orang. Kalau memang itu ternyata infrastrukturnya sudah bagus ya sanitasinya mungkin, kalau sanitasinya bagus ya berarti rumahnya, kalau rumahnya sudah bagus ya berarti jalannya. Ini apa-apaan *gitu* kan tidak ada konsep pembangunan yang semacam ini, Pak. Jadi yang namanya kemiskinan ekstrim itu dilihat dari segala unsur tidak hanya orangnya yang miskin ekstrim. Kalau orangnya miskin ekstrim itu misalnya adalah rumahnya tidak layak huni Pak Menteri PUPR sudah membuat program yang namanya BPS, itu sudah cukup. Jadi sebaiknya BPIW itu fokus terhadap wilayah yang strategis saja jangan di *grounded* semacam itu.

Jadi, untuk BPSDM ini saya, saya wanti-wanti BPSDM. Menurut hemat saya tapi nanti BPSDM pun juga harus melakukan pemetaan. Sebenarnya pokok persoalan kelemahan dan kekurangan Kementerian PUPR ini apa *gitu* kan. Kalau menurut hemat saya adalah sisi perencanaannya dan itulah yang perlu digenjot oleh BPSDM untuk ditingkatkan sumber daya manusianya. Jadi, antara perencanaan, antara konsep dengan yang di lapangan ini dikorelasikan ada benang merahnya di mana. Jangan ke lihat di lapangan itu terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan tapi dalam tataran konsep itu tidak nyambung begitu. Ini saya tanyakan mungkin dijawab langsung, Litbang ini bagian BPSDM atau tidak? Bukan? Berdiri sendiri, ya? Oh ya, BRIN yang Ibu Megawati *oh* ya udah.

Saya kira itu Pimpinan, jadi saya berharap semua ini, ini nanti juga akan saya tanyakan kepada Dirjen-Dirjen, kepada BPJT, bahwa ekosistem konstruksi harus terwujud secara baik. Saya kira ini terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Itu yang **ngeri** dimaksud Pak Sudewo itu semestinya habis lelang pengerjaan tapi Direktorat Jenderalya juga mesti tetap mengawal. Apakah sudah sesuai perencanaan atau tidak, itu ya, yang sering kita hadapi bersama di lapangan. Silakan kepada Pak Fauzi, Muhammad Fauzi, ini habis bagi-bagi apa saya lihat tadi di grup.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E):

Iya makasih, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang saya hormati Bapak Pimpinan, rekan-rekan Komisi V,
Bapak Inspektorat,
Bapak Sekjen,
Bapak Kepala Badan PSDM Kementerian PUPR, dan
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah PUPR dan Bapak-
Bapak-Ibu-Ibu yang maaf *nggak* bisa saya sebutkan satu persatu
namanya,**

Ada beberapa hal yang ingin saya minta tolong untuk diperjelas, ya, atau didalami karena masih apa masih perlu pendalaman terutama untuk saya mudah-mudahan juga untuk teman-teman.

Yang pertama di halaman, untuk apa yang pertama dari belakang saja saya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang pertama di halaman 3 di poin (f), Pak, itu pelaksanaan fungsi lain. *Nah*, yang dimaksud dengan pelaksanaan fungsi lain kira-kira contohnya itu apa, Pak, *gitu*, Pak, itu yang pertama Pak.

Kemudian yang kedua saya juga ingin mengetahui, Pak, sejauh mana Pak, hasil dari program atau pelatihan peningkatan sumber daya manusia yang Bapak jalankan dan dipakai dalam rangka penempatan jabatan, Pak. Ini kan bicara kompetensi ujung-ujungnya, Pak.

Yang ketiga ya harapan kami, kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dijalankan di pelatihan-pelatihan di tempat Bapak walaupun waktu itu mungkin Bapak belum di sana ya, Pak, ya, ya disesuaikanlah dengan dengan apa kepentingan kami di Dapil, Pak.

Yang keempat untuk Bapak di sini di halaman 4, Pak ada juga peningkatan kompetensi ASN PUPR mendukung reformasi birokrasi. *Nah*, kira-kira Pak, apa yang dilakukan Pak, *gitu* karena ini muncul mungkin tema-nya atau apanya Pak, ya tapi programnya seperti apa, Pak. Jangan sampai programnya apa ya saya mencontohkan misalkan Pak, kebetulan saya pernah di Komisi IX Pak, salah satunya membidangi tenaga kerja, Pak. Pernah kunjungan ke Filipin di sana yang kita kunjungi adalah balai latihan kerjanya. *Nah*, sangat jauh berbeda pelatihan yang diberikan mungkin kalau bicara silabus, materi dan lain-lain kurang lebih sama. Cuma dalam rangka kesiapan TKI Filipin, itu mereka lebih lebih luar biasa. Apa tenaga kerja asing atau tenaga kerja Filipina tidak akan dikirim apabila dia tidak menguasai apa, apa yang harus dikerjakan di apa, di tempat kerjanya, walaupun harus berulang kali dia harus ikut pelatihan. *Nah*, kalau di kita ini kan hanya seremonial saja begitu, ini saya contohkan Balai Latihan Kerja kita *gitu*, Pak. Apa ya, yang penting habis habis pakatnya diikuti selesai ya sudah mau orang orang apa TKI kita itu

menguasai atau tidak urusan lain. Apalagi tidak ditunjang oleh alat-alat yang memadai misalnya mesin cuci kita ini tahun, tahun berapa *gitu* sementara di sana tempat kerja sudah modern ini yang sering terjadi masalah *gitu*. Hal-hal kecil menyalakan mesin cuci saja *enggak* tahu karena memang mesin cuci di kita itu sudah terbelakang di apa, di apa di Balai Latihan Kerja itu contoh-contohnya. *Nah*, harapan saya di apa di PUPR ini, ya, tidak tidak seperti mendekati itulah bahkan mungkin bisa lebih bagus makanya saya ingin menanyakan apa yang dilakukan oleh Bapak. itu untuk apa SDM.

Kemudian, untuk badan pengembangan apa pengembangan infrastruktur wilayah. Yang pertama Pak, di halaman berapa ini *nggak* ada halamannya Pak, ya yang ini Pak, program kerja Tahun 2022 Pak, di sana ada penyusunan dokumen rencana pengembangan infrastruktur wilayah. *Nah*, ini saya ingin tahu Pak, berapa persen Bapak memasukkan penyusunan dokumen program kerja ini terhadap aspirasi kami, Pak, secara makro saja, Pak.

Kemudian, yang keduanya di sini ada juga tadi sampaikan juga oleh Pak Dewo sinkronisasi program. *Nah*, bagaimana mensinkronisasi program dalam hal program yang sudah berjalan tapi mangkrak Pak, bagaimana mensinkronisasikan itu Pak.

Yang ketiga ini menurut saya, saya juga *nggak* tahu ini Pak bagaimana menyiasati Bapak dengan anggaran misalkan di-*monitoring* Pak daerah kita ini cukup luas Pak sementara anggarannya 13,85 Miliar. Bagaimana strategi yang Bapak mau lakukan itu Pak, apalagi yang apa kepatutan internal di sini juga cuma 1,10. *Nah*, ini juga apa ya kira-kira strategi Bapak dalam rangka menjalankan apa untuk kegiatan ini.

Yang terakhir Pak, untuk Bapak, tadi Bu Cen bicara tentang Pulau Penyengat, di tempat kami itu Pak di Dapil III di Luwu Utara itu ada namanya Makam Datuk Patimang Pak, itu orang Sumatera Barat tapi dia menyebarkan agama Islam yang pertama di Sulawesi Selatan khususnya di Luwu Raya Pak, itu juga sekarang menjadi wisata religi. *Nah*, saya juga minta tolong kepada Bapak untuk itu dimasukkan program.

Kemudian juga program penyelesaian banjir Pak. Kemudian bagaimana pencegah apa kemudian juga program-program pencegahannya Pak seperti di Masamba, Sabodam itu mudah-mudahan juga masuk, Pak. Kemudian belum lama juga terjadi banjir lagi saya juga sudah saya serahkan program-programnya bersama Pak Menteri dengan Pak Sekjen kemarin, yang bendungan apa apa di daerah Suka Boni-boni itu. Pak Sekjen saya lupa namanya bendungan *aih*, lupa saya dekat rumah saya tinggal itu, Pak itu kan ada bendungan. Pak Sekjen *eh* Pak Sekjen apa Pak Irjen dulu pernah yang buat gambarnya kemarin itu apa bendungan apa Pak. Bukan Rongkong, di Sapta Marga, Sapta Marga sama Boni-Boni itu jembatan kanjiro, Bendungan Kanjiro iya itu, lupa saya. Jadi, itu untuk bapak,

Kemudian untuk Pak Irjen di halaman 3 Pak, ini ada anggaran yang dibintang Pak ya, yang 5 Miliar ini Pak, ya. Ini apa kenapa dibintang itu sebabnya, Pak. Kemudian, di halaman 5 di sini ada kebijakan pengawasan

2022 Pak, di sini Bapak ada fokus, ada tema, kemudian ada evaluasi. *Nah*, dalam sistem manajemen ada dua langkah yang menurut saya tidak masuk di situ atau mungkin di rinciannya Bapak, ada tapi tidak disampaikan di sini, dalam hal pelaksanaannya seperti apa Pak, dan pengawasannya. Karena biasanya kan ada perencanaan, ada pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Ada dua tahapan pelaksanaannya atau kegiatannya seperti apa dan pengawasannya seperti apa, sehingga nanti akhirnya bisa menciptakan evaluasi yang maksimal, Pak.

Berikutnya untuk Pak Irjen, saya juga ingin mengetahui bagaimana pembinaan bagi ASN yang sudah bermasalah, Pak. Apa sudah jelas-jelas dia bermasalah ini, *nah*, sekarang pembinaannya seperti apa *gitu*. Selanjutnya selanjutnya Pak, Ini juga tadi Pak Dewo juga sampaikan Pak Irjen, misalkan ada sebuah kegiatan masuk di ULP kemudian ditentukan pemenangnya. Dalam menentukan itu ada satu tahapan yang tidak dijalankan oleh ULP. *Nah*, itu bagaimana itu misalkan sering terjadi di lapangan teman-teman ULP tidak melakukan *cross-check* kelengkapan penawaran itu. Sehingga misalkan kita tahu yang menawarkan tidak punya alat berat tapi seolah-olah dia punya alat berat *gitu*. *Nah*, ini kan seharusnya harus ada *cross-check* di lapangan terhadap penawaran itu, sehingga bukan saja penawaran rendah yang kita dapat tapi kualitas kerja juga tidak terbengkalai *gitu*.

Yang terakhir untuk Pak Irjen, saya juga ingin mengetahui bagaimana koordinasi Bapak di internal PUPR, Bapak dengan teman-teman di daerah dalam hal pencegahan Pak. Itu untuk Pak Irjen

Terakhir, Pak Ketua untuk Sekjen, sebentar-sebentar. Di sini ada di halaman 20 Pak, Pak Sekjen anggaran Tahun 2022. Di belanja barang operasional dengan belanja mohon barang non operasional ini muncul di kedua belanja ini penanganan covid Pak. *Nah*, ini ada perbedaannya atau satu kesatuan Pak, itu yang perlu saya penjelasan.

Kemudian berikutnya di sini untuk di halaman berapa ya 25, tentang kegiatan utama terutama media ya, Informasi publik. Di sini di poin pelaksanaan publikasi bidang PUPR melalui berbagai media ada satu alat media yang Bapak gunakan adalah media internal Pak. *Nah*, saya ingin mengetahui bentuk media internalnya seperti apa Pak dan bagaimana jangkauannya. Karena media itu kan sebenarnya konsumsinya bukan untuk, diutamakan untuk masyarakat, bukan untuk untuk teman-teman PUPR sendiri ya *gitu* ya. Karena itu jangkauan media menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam kita menggunakan alat publikasi. Sehingga kita tepat sasaran karena setelah kita biasanya kan kalau media, Pak, kebetulan saya pernah disana juga ya di bidang ini. Pada saat sebelum kita menentukan media kita harus menentukan ininya siapa pembacanya, siapa yang kita mau tuju, pesan apa yang kita mau sampaikan dan siapa yang kita mau tuju, *nah*, baru kita menentukan medianya. *Nah*, kalau tujuannya kita masyarakat banyak *nah*, kalau medianya internal yang dipakai *nah*, ini kan menurut saya kurang, kurang pas. *Nah*, disamping itu juga berapa persen untuk media internal itu perbandingan internal dan media media eksternal.

Yang terakhir itu tadi sudah disampaikan sudah Pak Ketua, ya, aspirasi dengan bentuk *online* saya pikir ini kalau memang ini bisa menunjang ini akan lebih lebih baik. Kadang-kadang tidak etis juga, Pak Ketua, pada saat kita bicara terlalu terbuka selalu kita bicara tentang aspirasi. Apalagi terkesan kita selalu terkesan kadang-kadang meminta *gitu* ya. Kalau mungkin dengan *online* ini kita bisa sisipilah hal-hal seperti itu, sehingga bisa meminimalisir hal-hal negatif yang apa dari kita di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir Pak Sekjen, ya program-program kalau memang ada yang berhubungan dengan Dapil, ya cobalah kami dilibatkan Pak Sekjen.

Makasih, Pak Ketua,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Yang paling *urgent* tadi perempuan dari Padang ke Sulawesi Selatan menyebarkan agama, tapi namanya bukan Hayati, kan?

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E):

Bukan, namanya Datuk Fatimah.

KETUA RAPAT:

Iya seperti tenggelamnya Kapal Van Der Wijck antara Hayati dengan Zainuddin iya, Zainuddin itu orang Makassar iya.

Silakan Pak Fadholi, iya *kok* kagetan.

F-P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M.Ikom.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Bapak Ketua dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V, Pak Sekjen, Pak Irjen, kemudian Pak BPSDM dan juga BPIW yang saya hormati, dan Seluruh yang hadirin pada kesempatan hari ini,

Yang pertama saya menyampaikan terhadap Sekretariat Jenderal. Pak Sekjen tentu menyampaikan ungkapan penghargaan ya selamat Bapak telah menyampaikan dan telah memaparkan banyak sekali penghargaan-penghargaan yang sudah diterima, baik dari Menteri Keuangan maupun dari yang lainnya termasuk WTP.

Beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini ya karena saya sampaikan dulu bahwa saya Dapil saya itu saya dari Dapil I Pak Kendal Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Salatiga. Sehingga kalau saya sudah menyampaikan Dapil tentunya saya tidak perlu menyampaikan lagi

aspirasi untuk Dapil kan. Saya tahu bahwa coca cola itu ku tahu yang kau mau kan *gitu*.

Hal yang mendasar yang perlu saya sampaikan adalah mungkin begini Pak, bahwa kami perlu disampaikan. Ini kan sudah transaksi udah berjalan Tahun 2022, sementara ini di sini juga ada rencana anggaran Pagu untuk 2023. Terkait dengan rencana Pagu 2023 pada prinsipnya tentu karena memang ini *given*, saya mesti tidak memungkinkan untuk bisa menolak Pagu itu. Tetapi yang sangat penting saya sekarang ini adalah bagaimana Bapak bisa memaparkan, *sounding* dari Pagu anggaran yang sudah berjalan Tahun 2022 dengan rencana Pagu Tahun 2023 ini sangat penting. Dan, itu mestinya harus untuk pemaparan Tahun 2022 karena ini transaksi sudah berjalan tidak ada salahnya untuk bisa menyebutkan beberapa *item* yang memang secara konkrit. Tetapi yang saya lihat di sini ini secara keseluruhan ya pada keseluruhan bukan hanya kepada Pak Sekjen. Yang saya lihat bahwa di dalam laporan ini di dalam makalah ini adalah semua yang dipaparkan secara global jadi ini perlu dirinci. *Nah*, ketika kemudian kita bisa melihat paparan yang nanti yang sudah dirinci itu, maka kita akan bisa mengetahui sejauh mana rencana program dan untuk Tahun 2023. Kalau memang itu satu program yang kegiatan yang efektif saya pikir itu tidak ada masalah. *Nah*, tapi kalau kemudian memang dari sisi beberapa pelaksanaan dan sebagainya itu ada hal-hal yang secara kendala terkendala maka apa mungkin untuk bisa kita ikut mendorong dan kemudian menyetujui Pagu pada anggaran Tahun 2023, saya pikir itu tidak mungkin.

Nah, ini alasan itu mungkin perlu disampaikan kepada kami. Tapi pada prinsipnya jadi itu Pak Sekjen, yang lain-lain kami sama sangat sependapat jadi kami mendukung, hanya saja perlu adanya satu penjelasan secara apa agak lebih detail *gitu* terhadap program yang sudah dilaksanakan dan capaiannya. Kemudian para Inspektorat saya hanya akan menanyakan berapa banyak persoalan dan kasus yang selama ini ditemukan dan itu ada pada masalah apa saja Pak. Karena ini perlu untuk bisa disampaikan kepada kami bahwa atas temuan Inspektorat ini dan ini tujuannya untuk bisa mendapatkan hal-hal yang pembenahan. Kalau memang di PUPR ini dirasa sudah tidak ada kasus sudah tidak ada masalah saya pikir itu juga itu. *Nah*, berapa kasus yang itu sudah ditemukan dan yang sangat menonjol dan *urgent* kemudian untuk bisa disampaikan saya pikir itu perlu ada satu pemaparan pada kami untuk bisa disampaikan.

Kemudian yang berikutnya adalah pada BPSDM. Ini saya BPSDM ini kan lebih banyak untuk keperluan internal dan juga pada eksternalnya. Ini ada beberapa Tahun 2022 ada 5.220 orang dan Tahun 2023 itu 5.250 orang juga yang akan diadakan pelatihan. Ini dalam menentukan siapa yang akan dilatih ini bagaimana Pak dan ini siapa capaiannya apa, sasarannya apa, ini mungkin perlu disampaikan pada kami. Apakah ini semuanya dari internal atau juga memang dari eksternal yang bisa dilakukan. Kemudian pada apa pengembangan wilayah ya ini, saya hanya sampaikan aja Pak, saya sampaikan Dapil saya tetapi saya lihat di sini tadi belum ada rencana yang kaitanya dengan Dapil saya. Jadi saya pikir dengan bahasa saya Bapak sudah tahu maksud saya.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Mau diserahkan, Pak? Pak Fadholi mau diserahkan? Silakan Pak Bakri.

F-PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):

Baik makasih Pak Ketua.

Saya hormati Bapak-Bapak mitra Komisi V yang saya banggakan,

Saya menyampaikan pertama terkait dengan kerjaan ini Pak Irjen. Kerjaan kita tahu bahwa dengan adanya BP2JK jasa konstruksi ini memang banyak terkadang-kadang pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya mangkrak ditinggalkan Pak. *Nah*, ini sejauh mana ini penanganan terhadap ini karena kita tahu sebagian besar penawaran-penawaran itu rata-rata ada yang 80%, 70%, malahan ada di bawah 70%. *Nah*, ini di mana *gitu* Pak, di mana pola-pola cara untuk menghindari supaya kerjaan ini tidak sampai terbengkalai. Karena pengalaman saya pribadi itu di daerah saya ada pekerjaan *multiyears* kontrak pekerjaan jembatan di Sarolangun itu mangkrak. Jadi hampir cuma mungkin sekitar 60% ada, 60% atau 50% dikerjakan jembatan Pak. Bayangin Pak kalau sudah jembatan sudah dipancang ditinggalkan, wah saya ngebayangin pelat atau besinya itu atau corannya itu gimana. *Nah*, ini kalau kita bicara resikonya.

Terus yang kedua juga saya soroti juga juga di BP2JK ataupun di Jasa Konstruksi di situ, adanya ini kejadian juga di tempat saya. Sudah ikut menawar tender menang, sudah diumumkan, tahu-tahunya apa itu rekanan itu *blacklist* pernah *blacklist* tapi sempat dimenangkan. *Nah*, di tempat saya ini dua kali Pak satu apa sekolahan di cipta karya, terus ini baru-baru ini ada di sumber daya air begitu bantinganya bukan main, paling rendah *nah*, ini gimana sistem mengawasi yang begini gini Pak. *Nah*, ini yang perlu perlu mungkin pola-pola yang dari Kementerian PUPR mungkin di Inspektorat Jenderal perlu memikirkan ini. Karena lama kelamaan nanti ini pada kecolongan semua lama-lama, kalau di tempat saya pertama satu nih udah dua besok lagi ada satu lagi satu lagi nanti waduh kalau *gitu nggak* jelas caranya. *Nah*, ini kita sepakat lagi nanti kalau begitu BP2JK ini perlu ditinjau ulang aja lagi kan, Pak Dewo sih sarannya begitu sama kawan-kawan.

Nah, ini ini mungkin perlu apa penanganan khusus terkait hal-hal begini dan juga kemarin kita pernah ketemu dengan apa ya PPU ya atau apa itu ya bagian, LKPP ya. *Nah*, saya juga tidak tahu tindak hasil pertemuan kita tuh *gimana*. Karena memang kemarin saya sedikit agak keras pada saat itu saya bilang sama Pak Menteri yang kira-kira di bawah 80% awal itu sudah Pak dibatalin aja, tapi susah Pak Bakri bukan hanya kami sendiri *gitu*, ada LKPP di sini. *Nah*, kita bicara dengan LKPP waktu itu juga banyak juga alasannya macam-macam. *Nah*, ini perlu saya pikir Kementerian PUPR perlu mengambil langkah karena makin lama makin persaingan bukan hanya persaingan lokal

kita apalagi nanti kalau rekan-rekan kontraktor luar yang sudah menjamur masuk di Indonesia *nah*, ini akan menjadi lebih bahaya itu.

Terus yang kedua masalah sumber daya manusia ini, *gak tau* ini di Sekjen atau di SDM ini. Saya lihat juga tempat saya tapi di tempat mana-mana begitu kak yang namanya apa balai bahwa ada di beberapa daerah itu dengan banyaknya kegiatan-kegiatan itu SDM kita terbatas Pak. *Nah*, kadang-kadang juga ada satu orang oper kesana oper ke sini sehingga tidak maksimal. *Nah*, sama juga saya bilang saya nyorotin betul ini BP2JK ini. Itu saya pernah sarankan itu kalau bisa di BP2JK itu bukan hanya di tempat saya tapi di tempat mana-mana begitu Pak. Yang namanya apa Balai, Satker ada istilahnya apa itu ya pokja *nah*, pokja-pokja ini jangan lama Pak. Kalau sudah lebih 3 tahun 4 tahun *wah* ya memang kalau kita mau tunjukkan hitam di atas putihnya susah tapi kalau di warung kopi udah jadi omongan. *Nah*, saya tidak bicara tempat saya tapi sebagian besar yang kami dengar itu begitu, pokja-pokja itu kalau sudah dua tahun udah ganti dah jangan sampai 3 tahun 4 tahun.

Ada juga alasan Pak Bakri kita mau ganti susah *nah*, ini tugas kita Pak tapi jangan alasannya susah orangnya mencari spesialis bidang-bidang begitu sehingga mereka itu itu aja. Saya terus terang aja, Pak, memang di komunitas kita di sini di Komisi V ini sudah menjadi omongan umum itu para pelaku pokja-pokja itu ada yang iya ada juga yang baik mungkin ya tapi tidak semua juga baik. Ada yang buruk tapi tidak semua juga buruk tapi bahasa-bahasa ini selalu terdengar. *Nah*, oleh sebab itu ini juga perlu saran dari Kementerian untuk memperbaiki *gini* ya memperbaiki. Supaya jangan sampai ada orang-orang yang memang betul-betul lama-kelamaan di situ *gitu*.

Berikutnya saya pingin juga menyampaikan ini ke ke Pak Rachman Arief ini. Saya ada mengusulkan itu Pak sama Pak Menteri Pak Basuki, terakhir kemarin juga saya sampaikan Jembatan Sungai Rambut. Kalau Pak Menteri pasti-pasti Pak Bakri *insyaAllah* saya kalau tiap ketemu beliau tuh selalu disebutnya Pak Pak sungai rambut katanya *nah*, itu karena saya sering nyebut jembatan sungai rambut. *Nah*, saya dengar dari orang PUPR Provinsi Jambi pernah dibahas katanya dihapus Pak ditolak, yang tolak siapa, BPIW katanya. BPIW, saya bilang kok hebat sekali Pak Rachman ini bilang batal-batalin Pak Menterinya bilang iya tapi mungkin harus diomongin.

Nah, ini Pak iya jadi jembatan itu Pak sebenarnya tujuannya bukan hanya semata-mata untuk menuju ke Pelabuhan Ujung Jabung tapi kalau jembatan itu dibikin akan membuka keterisoliran apa ketertinggalan 2 ada 3 atau 4 Kecamatan Pak di 1 Kabupaten. Dan di Jambi itu ada 1 Kabupaten namanya Tanjung Timur, itu mereka kapan harga sawit naik mereka tidak bisa menikmati Pak. *Nah*, sekarang menjerit Pak, harga sawit cuma 100 perak bukan 100 rupiah, 100 perak kalau bahasa sana 100 perak per kilo Pak sawit hari ini, *nggak* tahu Pemerintah disalahkan. *Nah*, tapi pada saat harga sawit 3.500 mereka tidak ngomong, nah, pas 100 perak ini mereka itu. *Nah*, daerah itu tertinggal karena apa karena infrastrukturnya daerah rawa. Jadi semata-mata jembatan itu mau dibangun bukan semata-mata untuk ke pelabuhan tidak Pak, tapi membuka keterisoliran 3 atau 4 Kecamatan di Provinsi Jambi. *Nah*, ini minta tolong Pak Rachman Arief mungkin saya dengar itu dari Kadis PU nya

saya terkejut juga mungkin kurang kurang lobi saya Pak Rachman Arief. Sebab Pak Rachman Arief semenjak di BPIW ini jarang kita ngomongin, Bina Marga dulu rajin kita Pak, lobi-lobi kan.

Terus di Jambi juga kita sedang membangun yaitu ada namanya tiga wisata yang menjadi unggulan. Pertama kemarin yang dikunjungi oleh Bapak Presiden yaitu Candi Muara Jambi. *Nah*, ini juga perlu dipikirkan Pak untuk kelanjutannya untuk kelanjutannya. Karena kita *ndak* tahu nih Pak Jokowi itu kan bentar lagi 2024 ini kalau *nggak* lanjut ya saya takut program ini juga kalau sudah masuk di tempat Bapak kan paling tidak setiap saat bisa kita pantau. Ini program Candi Muara Jambi, terus ada Geopark juga sudah diusulkan ke UNESCO, terus ada namanya Danau Kerinci atau Gunung Kerinci. *Nah*, ini ini juga tolong diprioritaskan sehingga betul-betul daerah ini menjadi daerah-daerah wisata. Itu aja mungkin dari saya, saya coba buka ini ada di halaman 43, *nih*, Pak Arief Nomor 33 PKN Jambi, Sumatera 2020. Tadi saya tanya adik-adik di bawah *tuh* pusat kegiatan nasional *nggak* tahu saya apa-apa aja di situ kira-kira.

Itu aja mungkin, Pimpinan dari saya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Bakri oke.

F-PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):

Sebentar Pak Ketua, belum-belum Pak Ketua, sabar Pak Ketua, iya cukup, Pak Ketua. Makasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Jhonni Allen.

F-P. DEMOKRAT (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):

Terima kasih simpel *aja* lah, ya, semua dari tadi udah menyampaikan ya langsung aja. Kalau dibilang pengalaman keahlian orang itu orang top-top *loh* emang kerjanya begitu ya termasuk tenaga-tenaga ahlinya udah ya. Hanya barangkali tinggal *sense of belong aja*, rasa tanggung jawab atas tugas dan tugas pokok yang ada pada dirinya. Tentunya ini Sekjen, ya kesekjenan harus lebih dominan melihat ini dan Inspektorat atau Irjen dulu namanya Inspektorat ya. Kalau soal ini lengkap semua ya, bahwa pendidikan dari segi pendidikan punya Politeknik ya, dulu Bandung sekarang Semarang, ya. ASN-ASN semuanya *studi banding* ke daerah-daerah ya tetapi faktanya ya mari kita lihat ini faktanya di mana-mana saja.

Pak lihat sekarang Bogor Jagorawi Bogor. Coba kita lihat sisi mana yang selalu dibetulin atau bongkar pasang. Adalah sisi yang ditambah kiri kanan bukan sisi yang dibangun oleh apa dulu itu, iya kan, itu iya *nggak* pernah. Kenapa ke Instansi *nggak* bisa mencontoh itu *gituloh* kira-kira. Coba lihat tadi

itu macet itu pasti yang di apa dibongkar itu adalah sisi penambah, dulu kan dua jalur itu ada jadi yang empat jalur mendekati ke tengah satu mendekati ke pinggir. Itu aja yang di bongkar-bongkar terus bongkar, padahal itu baru umurnya relatif jauh lebih muda, ya. Saya ingat dulu saya waktu tahun 78-79 pertama 500 tol 500 perak dulu itu ya itu pembukaan pertama waktu saya mahasiswa tahun 78-79, udah berapa tahun? 42 tahun yang lalu. Sementara yang ditambah ini paling kurang lebih kalau *nggak* lebih dari pada 10 tahun yang lalu tapi terus sekarang. *Nah*, artinya apa kembali saya katakan tadi *sense of belong*.

Nah, bicara bicara soal standar saya kira buku pintarnya sudah hapal Bapak-Bapak ya, bicara soal standar buku pintar ini sudah Bapak-bapak yang buat ya baik dari segi perencanaan. *Nah*, soal adanya penawaran kemarin kita ke Banjarmasin, ya. Soal adanya penawaran sesuai dengan katakanlah 80% atau apa itu silakan saja kalau *emang* iya, tetapi bukan berarti merubah spesifikasi daripada RAB atas penawaran dari rendah itu betul *nggak*. Pak Sekjen, coba bisa mohon maaf, benar *nggak* merubah *nggak* dengan penawaran rendah terus menerus. *Nah*, oleh karena itu siapa yang bertanggung jawab adalah pelaksana pengawasan itu siapa? Ya, balai-balai dari pada bertanggung jawab terhadap anggaran itu walaupun katakanlah bina konstruksi yang melelangkannya kan *gitu* kan *gitu* kira-kira. *Nah*, kemarin ada (suara kurang jelas) ini kan masih biaya pemeliharaan Pak. Berarti kalau biaya pemeliharaan masih dalam konteks pemeliharaan boleh dong di bawah standar atau rusak-rusak. Namanya pemeliharaan itu adalah dalam rangka untuk melihat kualifikasi dari pada hasil kerjanya selama sekian tahun sesuai standar *nggak*. Tetapi kalau memang dia menyalahi dia harusnya tidak boleh lolos termin terakhir di dalam pembayaran terakhir kan *gitu* kira-kira Pak, ya kan ada beberapa terminkan misalnya sistem pembayarannya.

Saya kira ini rasanya yang saya tahu, ya, karena kita juga pernah di situ ya yang saya tahu pola tugas dan tanggung jawab dari pada semua apa namanya para Tupoksi masing-masing, apakah itu katakanlah pelaksana, pengawas ya. *Nah*, tentunya kembali di sini Sekjen dan Dirjen apalagi pakai surat (suara kurang jelas) ini saya kira peranannya sangat penting di lihat dari pada sinkronisasi ini ya. Kalau soal katakanlah soal siapa yang melelang siapa ini saya kira itu *wong* satu rumah kok Kementerian bukan dari rumah lain ya, jadi artinya di situ sinkronisasinya.

Nah, kecuali memang ya mohon maaf ya hanya mau lempar sana lempar sini ya berarti tentunya ada yang tidak beres *kok* bisa dilempar *kok* aman misalnya kan. *Nah*, tentunya mohon maaf juga kalau itu bisa terjadi Irjen juga kaya apa ini melihatnya ini kan kira-kira itu kan, itu kan salah satu apa namanya pengawasan internal inikan apa Inspektorat Jenderal kan *gitu*. Sebelum nantinya keluar kan *gitu* kan keluar ada BPK ya kan *gitu* kira-kira atau penegak-penegak hukum lain.

Nah, sama juga satu lagi Pak Sekjen yang saya tahu bahwa di dalam adanya kekurangan kesalahan itu kan namanya kan administratif (TL), ya *toh*. *Nah*, setelah TL belum bisa masuk ke dalam ranah hukum pidana masih dalam ranah hukum administratif ya kan. Ranah hukum administratif itu kan ada

namanya tindak lanjut kan *gitu* ya. *Nah*, tindak lanjut itulah yang harus diselesaikan. Apabila ranah tindak lanjut itu diselesaikan baru masuk ranah tindak hukum kerugian negara, kan *gitukan*, tapi selama masih bisa TL dilanjut sesuai dengan katakanlah prosedur administrasi yang ada. Saya kira *nggak* perlu masuk dia ke dalam langsung ranah kepada tindak hukum Kepolisian, Kejaksaan *nggak* penting ya, masih dalam ranah tindak hukum administratif yang bisa ditindaklanjuti dengan memperbaiki atau ganti rugi kan *gitu* kira-kira. Begitu dia tidak mau melakukan itikad baiknya masuklah tindak ke tindak pidana kerugian negara.

Saya kira ini, ini juga saya kira Sesdirjen apa ini harus tegas juga di sini sebagai pengawasan internal terhadap dari pada mitra Bapak internal kinerjanya. Supaya mereka kadang-kadang Kepala Balai juga ada yang ketakutan, kalau *nggak* ini begini. Kenapa harus takut selama anda di dalam aturan-aturan administrasi yang ada.

Saya kira itu, Pimpinan, secara umum, makasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Sebelum Pak Ketua silakan Pak Sudjadi di alam *ghaib* sana, iya Pak Sudjadi, suaranya Pak djadi.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Assalamu'alaikum.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Masih di Grobogan, Pak.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Pertama terima kasih Bu Bupati sama *tausiyahnya* Pak Kyai, jadi hatinya hingar bingar dan percaya Grobogan akan maju terus, untuk menyampaikan Pak Wakil Ketua.

Yang kedua Pak Sekjen, Pak Irjen, Mas Ketua BPSDM, Pak BPIW selamat siang, saya tidak tanya cuma saran aja. Jadi saya apa memahami bahwa pengetahuan saya sangat terbatas, jadi saya tidak bisa cerita yang panjang-panjang.

Kepada Pak Sekjen cuman mohon korelasi antara DAK yang akan datang itu dengan Inpres 2023, apakah Inpres jalan atau apa. Karena Pak

Bupati yang memimpin sedang giat-giatnya menyusun korelasi untuk dicek melalui krisna atau apa namanya, ini korelasinya aja.

Kepada Pak Irjen ini barangkali ini agak kelupaan dari Pak Irjen. Banyak proyek-proyek kita itu yang langsung dikelola oleh Pemda maupun Desa. *Nah*, pertanyaan saya apakah Bapak Irjen menemukan juga proyek-proyek yang diserahkan itu tuh *idle*. Contohnya yang banyak itu seperti di TPS3R, itu kelihatannya kalau tidak diperbaiki manajemennya banyak yang *idle*, terus khususnya PAMSIMAS. PAMSIMAS harus dirubah bukan PAMSIMAS-nya Bank Dunia. Kalau Bank Dunia itu dulu semboyannya kan pemberdayaan, jadi yang mengelola masyarakat. Kalau PAMSIMAS zaman dulu sekarang itu banyak yang *idle*, yang sekarang-sekarang bagus itu PAMSIMAS itu dikelola oleh Pemerintahan Desa. Karena Pemerintahan Desa itu sudah punya otoritas, punya kekuasaan, punya uang, jadi itu. Jadi itu, jadi kami mohon Pak Irjen itu di apa evaluasi, Pak.

Yang kedua ini Padat Karya Tunai Bina Marga ini, ya semua aja, kadang-kadangan 10.000 sekian ribu itu cara ngitungnya gimana, Pak. saya masih ingat awal-awal ide Padat Karya Tunai itu dari Pak Presiden itu harus *by name by address*. Jadi harus lewat Kepala Desa, Kepala Desa setor tenaga hari itu tapi tidak artinya suruhan orang lain, suruh mencari tukang-tukang itu nanti juga ada pungutan-pungutan yang tidak baik. Coba Pak Irjen, ini di teliti betul cara entah itu Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, mendapatkan tenaga PKT itu caranya *gimana*. Atau hanya diborongkan atau konsep yang dulu masih dipakai yaitu *by name by address* yang usul Kepala Desa atau Lurah setempat.

Terus kemudian BPIW Pak, ya, saya memohon Cipta Karya sama sumber daya air itu sumbangannya untuk mengurangi desa miskin apa desa miskin *absolut*, miskin ekstrim itu banyak sekali, besar sekali. Tolong bagian informasi itu disebarluaskan Pak, jadi seolah-olah saya itu kan kadang-kadang *grantes*, *moso* Bapak Wapres *nggak* tahu begitu besarnya perjuangan PU untuk menurunkan desa ekstrim. Sehingga yang hanya didengar suaranya BKKBN, ini kadang-kadang ini *nggak* adil ini, Pak. Ini Pak Dirjen tolong itu betul-betul ini Pak BPIW sama Pak Irjen kadang-kadang *nggak* adil. Masa sumber-sumber *anu* miskin ekstrim hanya dari BKKBN, Bupati-bupati juga banyak mengeluh karena pilihan desanya banyak yang belum.

Yang terakhir kepada Mas Khalawi saya terima kasih. Saya akan umumkan nanti kepada Kepala Desa yang punya anak lulusan SMA, lalu bidang teknik ya, bukan bidang sospol, bisa diterima di Politeknik miliknya PU. Kalau Dapil saya di Jawa Tengah di Magelang, ya, Politeknik di Semarang. *Ngaten* Pak Pimpinan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, Pak Pimpinan, sekali lagi Bupati amat bangga atas *tausiyah* ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Pak Bupati salam sama Bupati Grobogan, Silakan, Pak Ketua.

F-PDIP (LASARUS, S.SOS., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pak Tamliha sebagai Pimpinan rapat,

**Pimpinan dan teman-teman Komisi V yang saya hormati,
Pak Sekjen, Pak irjen, Kepala BPIW dan Kepala BPSDM Kementerian
PUPR, beserta seluruh jajaran yang saya hormati,**

Saya barangkali agak sedikit keluar dari materi. Pertama terkait rapat kita hari ini, ini rapat pengawasan juga adalah rapat dalam rangka sedikit menyinggung soal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Di bahan ini, saya lihat ada beberapa hal penting yang disampaikan. Saya melihat ada mekanisme penyampaian usulan, kemudian mungkin usulan pembangunan dari daerah ya yang ditawarkan oleh dari Sekjen, kemudian juga terkait dengan DAK. Kalau dua hal ini Pak Sekjen tinggal kita sepakati saja saya rasa ya mekanismenya maunya bagaimana *gituloh*, yang mau pola menyerahkan langsung atau lewat lewat sistem *online* ya *monggo* aja *gituloh* *nggak* masalah. Yang penting kalau kami tindak lanjutnya Pak ya kan *gitu* Pak Dewo ya yang penting kan tindak lanjutnya toh. *Nah*, mau dibawa langsung atau *online* *monggo* saja itu, mesti clear itu tindak lanjutnya.

Kemudian saya perlu menekankan lagi Pak posisi tugas pokok dan fungsi DPR ini kan ada tiga ya. Yang pertama kemudian kita sebagai apa namanya fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hari ini kita adalah bicara soal yang ketiga Pak fungsi pengawasan. Dalam konteks pengawasan menurut saya ya seluruh pekerjaan teman-teman di PU itu adalah ruang lingkup dari objek pengawasan yang menjadi kewenangan konstitusi teman-teman di DPR.

Saya perlu mengingatkan ini Pak Sekjen, kadang-kadang kami menyampaikan bahwa ada apa namanya teman-teman dari PU yang sulit diajak komunikasi di daerah ya, itu disampaikan oleh banyak teman-teman di forum rapat ini. Ya sebagai mitra menurut saya ini tidak tidak tidak lazim tidak bagus kan *gitu* Pak ya, ya Pak Irjen ya. Yang penting kan kita berjalan di rel kita masing-masing *gituloh*, berjalan di rel kita masing-masing. Kami tentu pasti tahu Pak ya tidak semua kenal tapi pasti kita semua tahu. Contoh kalau Pak Dewo pasti udah tahu semua siapa PPK, siapa Satker, siapa Kepala Balai di wilayahnya pasti tahu, yo to Mas *sampean* pasti tahu. Kemudian yang mana yang bisa diajak apa bukan bisa ya, yang mana yang mudah komunikasinya mana yang sulit dihubungi sulit diajak diskusi, kemudian sulit untuk kita melakukan tugas-tugas pengawasan dan seterusnya.

Jadi masukan dan saran teman-teman menyangkut personil ini kadang-kadang agak sensitif Pak. Pak Sekjen ini ranahnya Pak Sekjen dengan Pak irjen ini agak sensitif, karena ini menyangkut orang ya. Menyangkut orang ya saya yakin teman-teman tidak berani sembarangan juga Pak karena ini menyangkut kredibilitas seseorang *gituloh* kalau salah bicara kan bisa celaka orang. *Nah*, dan kita juga melihat saya tahu Pak Sekjen, Pak Irjen udah punya

standar di PU tuh. Standar si (A) masuk kerja kapan, angkatan tahun berapa, kemudian sudah pernah mengikuti pendidikan apa saja, kemudian jabatan apa saja yang pernah ditempati, kemudian yang terakhir *track record*, kita memahami itu Pak. Tapi di luar daripada itu Pak Sekjen, Pak Irjen ya terkait dengan fungsi pengawasan kami ya Pak ya. Kami juga akan menyampaikan *gituloh* Pak, akan menyampaikan bagaimana pekerjaan di wilayah kami masing-masing ya kegiatan di wilayah kami masing-masing. Kemudian yang menangannya siapa, bagaimana dia menangani dan seterusnya dan seterusnya.

Jadi jangan alergi juga Pak, kalau mungkin ada teman-teman yang bicara soal orang *gitu* lho. Karena perilaku ini kan susah kita untuk digeneralisir tapi ada standar Pak ya bukan pakai rasa suka tidak suka, *nah*, kalau pakai Suka tidak suka ya *ndak* bener dong *gituloh* tidak benar kita. Saya juga tidak setuju kalau judulnya hanya karena *like dislike* apalagi dalam tanda kutip *gitu* lah ya. Tapi kalau memang masukan itu benar Bapak juga harus didengar *gitu* lho *nggak* perlu alergi juga. Wah ini DPR kok campur-campur soal personil bukan campur Pak. Karena seluruh kegiatan di daerah kita ditangani oleh orang bukan oleh robot Pak, ya kita kalau ditangani oleh robot ya kita ngomong sama robot Pak *ndak* perlu ngomong sama orang, kan begitu Pak Jhonni ya, *nah*, ini terkait dengan fungsi pengawasan ya.

Saya rekam jejak di wilayah saya tuh saya tak baca semua Pak. Si A dulu ketika menangani ini kerjanya bagaimana, sukses apa tidak, ada masalah atau tidak, kita ini semua. Kalau kita kasih masukan Pak yang bersangkutan tolong jangan dikirim lagi ke sini, masih juga dikirim ke sana ya saya tak ingatin Pak ya tak ingatin dari sini saya tak teriakin Pak kalau masih dipaksain *gituloh*, tak bongkar semua biar Bapak juga tahu ini loh yang kita *nggak* mau kan *gitu*. Kita *nggak* mau subjektif soal orang saya perlu mengingatkan ini Pak Sekjen supaya kita tidak berbeda pendapat dalam hal yang menyangkut orang. Karena ini saya sampai bicara begini pasti ada sebab Pak Sekjen ya, saya sebatas itu dulu kalimat saya. Tapi kalau masih juga nanti tak loncat ke tahap berikutnya halaman berikutnya kalau masih dianggap penting. Tapi kalau dianggap cukup, cukup sampai di situ saja karena ini nyangkut orang kita harus berwibawa juga membawa ini di forum-forum seperti ini.

Kemudian soal aspirasi tadi tentu nanti ketua sasaran Pak ya. Saya ini selalu pastilah benteng terakhir di Komisi ini kalau sudah menyangkut aspirasi Pak. Saya berharap mekanisme apa saja pun yang diterapkan oleh kita mau langsung menyerahkan catatan ataupun misalnya nanti apa namanya lewat sistem *online* Pak ya itu *monggo* saja. Cuman yang penting nanti adalah tindak lanjutnya sejauh mana itu bisa ditindaklanjuti. Ini penjelasan ini penting Pak supaya kami tidak berdebat di dalam sini terkait dengan apa standar acuannya. *Nah*, yang cilaka kita ini Pak kami ini *ndak* ada Pokir seperti di DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi. Saya juga kadang-kadang juga mikir Pak JHONNI, nih kalau teman-teman di DPRD Kabupaten dan Provinsi itu ada istilah Pokir Pak, (pokok-pokok pikiran). *Nah*, sekarang semenjak putusan Mahkamah Konstitusi tempo dulu ya sebetulnya di situ yang punya Banggar Pak Banggar sebetulnya bukan di level Komisi. Tapi tempo hari Pak Hamka ini berulang-ulang kita sampaikan Pak karena ini perdebatan ini masih terjadi sebetulnya antara Pemerintah dengan kita. Ini DPR boleh *ndak* masuk sampai

ke sini, ini kan masih berdebat kita ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini itu loh. Tapi dari putusan Badan Anggaran tahun lalu kalau saya tidak salah Pak Hamka kan sampai berbunyi itu tahun lalu nanti tolong Bapak ingatin Pak.

Karena saya tadi sebelum ke sini Pak kami tadi webinar dengan KPK Pak ya seluruh Anggota Fraksi, semua pengurus DPD se-indonesia, DPC se-indonesia webinar dengan KPK terkait dengan pemberantasan korupsi. Jadi makanya saya tadi tidak bisa datang, tapi sebelum saya ke sini sudah banyak teman-teman WA ke saya dari Komisi ini. Pak Ketua nanti tolong ini disampaikan di rapat saya sampaikan terkait dengan mekanisme penyampaian. Karena kita ini ndak ada standar Pak kalau ada standar acuan itu kita enak Pak. Saya juga sebagai Pimpinan Komisi juga enak kami-kami ini Pak Tamliha ya ini *borderline* kita di sini loh Pak kita bilang *gitu* sama teman-teman kan, kita batasannya sini loh ini ndak boleh sampai sini. *Nah*, ini kan abu-abu ini Pak, *nah*, ini yang bikin kita sulit Bapak juga jadi susah jadinya.

Nah, barangkali ini yang harus kita sepakati supaya kita tidak berdebat terlalu panjang soal ini, ada semacam kesepahaman kita loh Pak ya. *Nah*, kalau saya lihat kan udah lah kalau Pak Menteri bilang udahlah Pak yang sifatnya apa namanya padat karya-padat karya udah *monggo* teman-teman silakan *gitu* kan *gitu* Pak ya, *nah*, kan Pak Menteri samakan ya hanya sampai di situ saja. *Nah*, ketika di luar itu bisa *nggak* kan masalah lagi kita ya kan, ini harus jujur kita akui Pak. Karena Pak Lasarus saya waktu kemarin mengusulkan sekian disuruh ngusulkan tapi *nggak* ada satupun catatan saya masuk itu Anggota ngomong *gitu* kayaknya. Kita saya tempat curahan hatinya Pak curahan hatinya saya pun ndak bisa ngomong juga, karena kewenangan kan tidak berada pada saya.

Nah, jadi barangkali sebelum kita nanti maju ke sana Pak ini harus ada skema kita ya saya *fair-fair-an* aja ngomong di sini ya teman-teman sekalian Pak Robert ya, untung saya udah ngomong duluan Pak Robert datang Pak. Kalau tadi Pak Robert ngomong duluan *nah*, saya yakin lebih keras Pak Robert ngomongnya, tapi karena saya udah ngomong duluan saya pikir Pak Robert *ndak* perlu banyak lagi bicara soal-soal yang bagaimana kita menyampaikan usulan pendapat dan saran dari teman-teman, ini saya pikir PR buat buat kita semua. Saya tidak bicara teknis kalau teman-teman ini menguasai Dapilnya masing-masing teman-teman udah tahu Pak Apa yang harus didahulukan di Dapilnya.

Kemudian yang terakhir terkait dengan Inpres tadi Pak ya, Inpres kalau saya *nggak* salah kemarin Pak Pak Menteri bicara soal Inpres Pak ya Instruksi Presiden Pak ya. Iya terkait kalau manakala nanti PP (Peraturan Pemerintah) pelaksana undang-undang, dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Undan-Undang Nomor 2, kan ya, betul ya, *nah*, nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Kemarin yang saya dengar di Raker yang lalu Pak Menteri sudah membahas sedikit dari pertanyaan kami. Beliau menjawab bahwa manakala nanti PP-nya belum mungkin ini berupa Inpres. Isi Inpresnya apakah nanti kita mengeluarkan seluruh DAK-DAK infrastruktur ya, DAK-DAK jalan maksudnya yang ada di masuk ke Bappenas atau apa ke Kementerian Keuangan nanti dikeluarkan untuk dibahas di sini. Ini yang kita tentu menenunggu ini Pak, Pak

Sekjen. Kami berharap Inpres ini keluar disaat kita belum ketok undang-undang tentang APBN Tahun 2023. Sekarang semua pada nunggu ini Pak Sekjen dan Pak Irjen ya kita nunggu ini. Karena pergerakan mekanisme baru ini tentu harus dibungkus atau di apa namanya harus dilindungi dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan-pimpinan saya nambahkan supaya tidak lupa nanti.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Yang ditekankan oleh Pimpinan supaya Inpres diketok sebelum tahun APBN 2023 itu bagus, tapi saya tambahkan supaya Inpres sebelum diketok dibicarakan di sini dulu dikonsultasikan di sini dulu.

F-PDIP (LASARUS, S.SOS., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Baik. *Monggo* aja nanti mekanismenya Pak *monggo* aja silakan ya Pemerintah, apa namanya melanjutkan itulah. Pasti acuannya kan pasti aturan dan ketentuan yang sudah ada, kita *positive thinking* aja Mas Dewo kepada Pemerintah. Dan, tentu harusnya sebenarnya seperti ketika kita membahas Undang-Undang Jalan, dulu yang terkait dengan infrastruktur ya dibahasnya di sini sebetulnya Pak, bukan di luar sini. Menjadi aneh ada kegiatan infrastruktur dibiayai pakai APBN kok tidak dibahas lewat Komisi V. Itu DAK kan kita *ndak* pernah bahas di sini, dulu dibahas Pak kami *ndak* mau lagi. Karena kita tidak boleh menentukan lokus DAK-nya kita hanya disuruh melegalisir saja. Untuk apa Pak, kitanya hanya sebagai juru teken aja di sini, ya udah ambil aja DAK nya ambil aja infrastruktur terkait DAK *nggak* usah lagi dibahas di Komisi ini. Kalau dulu selalu kita agenda periode pertama kita apa aja ni kita bahas, Pak. Saya masih ingat di periode pertama saya Komisi V dulu kita bahas tuh DAK di sini, tapi kriterianya saja Pak, hanya kriterianya saja. *Nah*, munculah Krisna di di Bappenas, kemudian lobinya ke Kementerian Keuangan, yang terjadi maka kemarin *ndak* berani juga Pak Bappenas bertahan di sini ketika kita masukkan pasal, manakala jalan daerah itu tidak sanggup daerah tangani maka pusat harus mengambil alih. Tadinya kan Kementerian Keuangan dengan Bappenas bertahan itu Pak, ini kan Pak Sekjen mantan dari Bappenas tahu betul ini soal ini.

Saya udah punya jurus juga, Pak, *you* tahan *gue* serang pakai ini. Lalu saya bilang itu gimana cerita Krisna segala macam itu payung hukumnya dari mana, bernegara kok *nggak* punya payung hukum kita. Komisi ini udah jelas *loh* Komisi V bidang infrastruktur mitranya PU. Seluruh kewenangan pekerjaan di bawah PU tuh harus dibahas di sini, Pak, itu baru betul kita bernegara. Ini soal aturan main ini *role of law gituloh*.

Makanya Pak, seringkali terjadi penyimpangan karena ada yang berjalan tidak sesuai aturan. Kalau kita mau *fair* Pak ini DAK Bapak bisa petakan daerah yang harusnya banyak mendapat DAK malah *nggak* dapat Pak per hari ini catat saya ngomong. Yang harusnya dapat DAK malah *nggak* dapat Pak, yang miskin malah *nggak* dapat per hari ini. *Nah*, ini kita mau rubah Pak supaya sistem ini juga jadi baik terbuka *gituloh*. Ini kenapa daerah ini mesti kita bantu, indeks infrastrukturnya bagaimana, kondisi jalan daerahnya bagaimana, perlu kita intervensi, yang rusak kan yang perlu kita intervensi Pak Arif ya. Yang udah bagus kan *ndak* perlu Pak, yang minus yang perlu kita angkat derajatnya kan *gitu*. *Nah*, kalau pakai standar yang yang selama ini ya bagaimana.

Nah, mudah-mudahan Pak Sekjen ini memperbaiki situasi ini *gituloh*, Pak ya. Memperbaiki situasi ini sehingga lebih terukur soal DAK dengan Inpres ini nantinya. saya tidak tidak masuk soal-soal materi Mas Dewo ya soal Inpres ini tapi kita *positive thinking*. Saya yakin Inpres ini akan memperbaiki masalah yang yang tadi Pak Irjen, ya, masalah yang tadi saya bicarakan. Soal bicara pemerataan, kemudian azas manfaat dan seterusnya. Saya rasa itu saja dari saya Pak Pimpinan rapat mohon maaf agak panjang sedikit ya. Terima kasih mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya akhiri.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ketua.

Hari sudah menunjukkan jam 01.14 menit. Mungkin ada hal yang perlu di *stressing* oleh Pak Sekjen tapi mungkin tidak perlu disampaikan di sini, saya paham iya. Yang jelas jangan sampai ada suatu kegiatan selubang jarum pun yang tidak melalui Komisi V itu ya. Jangan ada satu lubang jarum pun yang tidak dibahas di Komisi V ini. Kalau yang lain-lain sama-sama alat kelengkapan dewan Pak, tapi kami cuma jangan mau lihat makanannya tapi tidak bisa mencicipi kalau fifty-fifty Pak Sekjen udah paham. Silakan, Pak Robert mau bicara silakan.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Makasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota komisi V yang saya banggakan,
Saudara Sekjen Kementerian PUPR, Irjen, Kepala BPIW dan Kepala BPSDM,**

Saya kira apa yang disampaikan tadi oleh Pimpinan terutama Pimpinan Pak Lasarus tadi ya. Saya kira itu yang sudah hampir setiap kerinduan kita semua selama ini, tapi saya bersyukur Pak Lasarus sudah menyampaikan.

Saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini Pak, terutama Pak Sekjen. Apa yang tadi sudah disampaikan Pak Lasarus saya menegaskan

lagi bahwa sebenarnya kami sangat banyak mengharapkan tentang untuk Kementerian melalui Pak Sekjen. Pak Sekjen yang harusnya menjadi jembatan untuk kami ke semua Dirjen yang ada di Kementerian PUPR. Saya kira itu yang menurut saya harusnya sebagai Sekjen tugas Saudara Sekjen itu. Agar apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang MD3 pada kami itu bisa terlaksana semuanya. Jadi ya, saya kira saudara Sekjen mengerti benar dan tahu aturan undang-undang yang melekat kepada Anggota DPR RI. Itu yang ingin saya minta kepada Saudara Sekjen agar ke depan bisa menjadi jembatan yang baik untuk kami. *Nggak* mungkin kami ajak Pak Menteri yang bisa bolak-balik ke sini kami tahu kesibukan beliau maka saudara Sekjenlah yang kami harapkan bisa sebagai jembatan kami.

Yang berikut Kepala Saudara Irjen ya. Saya kira ya apa yang dipaparkan oleh saudara Irjen di dalam laporan ini tentang kinerja 2022 dan tentang Program Anggaran 2023. Kalau kita bicara 2022 saya lihat di dalam semua laporan itu seakan-akan semuanya *oke-oke* itu ya. Tapi hemat kami bahwa banyak hal yang terjadi ini belum ada satupun tergambar di dalam ini. Tolong disampaikan secara jelas bahwa hal-hal yang ditemukan, ya, di dalam pengawasan. Tadi banyak disinggung oleh rekan kami Saudara Dewo tentang bagaimana ya kan suatu perencanaan proyek itu, terus harapan proyek itu bagaimana ke depan. Saya kira semua itu ada di dalam perencanaan, berapa lama dia harus bisa bertahan. Tapi kita lihat dari hasil evaluasi yang kami dapat di dalam pengawasan bahwa menurut kami dan saya kira itu semua bukan barang yang tersembunyi tapi semua kita melihat itu secara terang. Bahwa kalau itu terjadi seperti itu berarti ada satu perencanaan yang menurut kami ini ada *mark up* yang besar selama ini kalau memang itu terjadi seperti itu, ya kan. Saya kira perencanaan juga tidak mungkin ada akan *mark up* sampai segitu besar iya kan.

Kalau ada penawaran sampai di bawah 80% ya kan berarti yang selama ini seperti bagaimana dengan hasil kualitas daripada proyek yang ditawarkan sampai di bawah 80% ya kan, secara ini saya kira tidak masuk akal nantinya ke depan. Maka kita lihat banyak sekali sekarang jalan-jalan yang kita harapkan bisa bertahan 5 tahun aja tidak mungkin, baru setengah 2 tahun, setahun sudah hancur semuanya. Tolong evaluasi seperti ini tolong disampaikan juga kepada kami Pak Dirjen. Evaluasi-evaluasi ini kenapa sejak mulai diberlakukan ini seperti apa dengan penwaran-penawaran yang dilakukan oleh kontraktor-kontraktor yang kita tahu bahwa hampir dari seluruh daerah ini berebutan dengan memberikan satu penawaran Pak Menteri juga bilang bahwa ini tidak masuk akal tapi bisa dilakukan. Evaluasi ini yang perlu disampaikan ke kami ya kan agar kami evaluasi juga terhadap penganggaran nanti ya kan. Kalau memang itu layak baik ya berarti penganggarnya yang harus kami turunkan. Wah ini ada *mark up* alihkan saja untuk program-program yang lain lebih baik dari awal *gitu*. Saya kira hal ini yang perlu dilakukan oleh Irjen sebagai pengawas ya.

Yang berikut saya kira apa yang sudah disampaikan tadi Kepala BPSDM ya harusnya seperti itu. Bahwa ada program yang disampaikan dan ada disampaikan kepada Anggota sesuai dengan amanat undang-undang bahwa ini silakan Anggota yang bisa usulkan sesuai dengan amanat undang-undang

begitu, *space*-nya ada ini yang harus dilakukan seperti itu. Karena beliau di bekas dari Dirjen Perumahan *space*-nya ada untuk Anggota maka beliau mengingat betul bawah ini yang harus disiapkan *gitu* ya, tidak semua harus punya Pemerintah. Kita bukannya *ujug-ujug* bawa begitu karena ada daerah-daerah pemilihan kami yang memerlukan program-program seperti itu. Kayak tadi untuk anak-anak didik ya kan di Politeknik, ya berikan lah kepada kami kan ya dari Dapil kami, kami bisa usulkan ada anak-anak yang memang perlu pendidikan Politeknik UNTAR misalkan dimasukkan begitu. Jadi saya kira hal-hal ini yang perlu dilakukan oleh teman-teman di Kementerian selaku mitra kami yang ada di sini ya.

Kepala BPIW, mungkin saya belum banyak ini karena saya nanti minta tolong data dari Papua seperti apa yang perlu di tempat saudara Kepala Balai. Ya saya kira Pimpinan itu yang ingin saya garis bawahi agar ke depan ya kan dan kami sekarang ini kan baru bahas tentang awalnya. Kami tidak akan belum menurut saya belum mungkin kami dapatkan satu kesimpulan untuk menyetujui angka-angkanya ini ya, kita baru bisa memahami saja dan kita akan memperdalam lagi untuk seperti apa ya yang harus kami menyetujui.

Saya kira itu Pimpinan, saya kembalikan ke Pimpinan. Terima kasih atas waktu yang diberikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Robert dan kawan-kawan sekalian. Mungkin tidak diperlukan respon secara lisan karena hari juga sudah setengah satu, setengah dua, jam 2 nanti akan lanjut dengan Kementerian Perhubungan. Saya ingin menawarkan

F-PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):

Pak Ketua interupsi, Pak Ketua, satu menit aja Pak Ketua sebelah kanan.

KETUA RAPAT:

Iya silakan, silakan.

F-PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):

Izin Pak Sekjen, Pak Irjen.

Itu terkait dana DAK itu kan sebagian besar itu kan di daerah itu jalan Pak ya jalan irigasi. *Nah*, saya lihat pengawasannya memang tidak terlalu maksimal apalagi itu sumbernya APBN banyaknya di lokasi itu diserahkan ke Provinsi, ada DAK melalui Provinsi ada Kabupaten. Itu menyalahi aturan tidak kalau umpamanya DPR RI turun langsung melihat. Ya mungkin hasil akhirnya itu mungkin pada saat pelaksanaan mungkin tidak kita tidak bisa lihat atau bagaimana kira-kira karena sumbernya APBN ini, ini aja. Kalau kita lihat sejarah kemarin kata Pak Lasarus memang pernah dulu pada saat

pembahasan DAK itu kita lepas karena cuma stempel. Dan, jujur juga saya sampaikan apa yang di katakan Pak Lasarus itu tidak *fair* sekarang DAK betul Pak. Ada bahasa minta 40 Miliar dikasih 4 Miliar, 30 Miliar 3 Miliar, itu jadi nolnya dikurang kurang *gitu nah, nggak* tahu ni yang banyak itu lari ke mana ini. Itu aja mungkin ini dalam rangka pengawasannya karena ini APBN.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, M.S.):

Pimpinan sedikit saya meluruskan dulu, ya.

Berbicara mengenai DAK, DAK itu adalah transfer ke daerah-daerah yang dalam hal ini DAK itu adalah masuk di dalam APBD Daerah yang otomatis kita tidak bisa kendalikan karena sudah merupakan transfer ke daerah. Persoalannya adalah bagaimana teknisnya PU sekarang ini hanya *advicer* saja terhadap itu, itu mekanismenya. Jadi mohon maaf Pak Bakri saya mewakili Wakil Pak, Pak Sekjen untuk jawab.

Makasih.

F-PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):

Iya Pak Sekjen *ndak* perlu dijawab Pak udah pas.

F-P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M.Ikom.):

Sedikit nyambung, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M.Ikom.):

Usulan DAK itu kan bukan sekedar uangnya aja yang masuk ke sana tetapi kan itu sudah *by name by address*-nya. Jadi kalau itu sudah *by name by address* itu hanya persoalan pengelola saja. Tetapi kan disetujui kan dengan catatan bukan hanya sekedar mentransfer uang tetapi dengan menyetujui rencana kegiatan yang memang akan dibangun. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Bakri itu tadi perlu ada satu tanggapan saya pikir itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya silakan, Pak Sekjen tanggapin dulu sebentar yang soal DAK ini.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Izin, Pak Ketua, Pimpinan, dan Ibu-Bapak para Anggota Komisi V DPR RI.

Untuk DAK jadi tadi sebenarnya penjelasan yang sangat *clear* dari Pak Hamka, pada prinsipnya ini memang transfer ke daerah. Kemudian apa tugas dari Kementerian PUPR, tentu memfasilitasi daerah agar mereka-mereka yang seharusnya *eligible* memang bisa *eligible*, kenapa bicara *eligibilitas* karena satu, Kebijakan DAK-nya sudah diatur sekurang-kurangnya di RKP. Mohon saya dikoreksi Pak Hamka dan tentu ini dibahas pada saat penyusunan Undang-Undang APBN. Bidang-bidang yang terkait dengan infrastruktur di situ di tidak semua bidang juga masuk, artinya sesuai dengan prioritas yang ada yang sudah ditetapkan di situ.

Oleh karena itu, maka usulan-usulan yang dikerjakan oleh teman-teman Pemerintah Daerah, jadi mohon maaf ini seringkali mungkin teman-teman Pemerintah Daerah kurang pas menyajikan apa yang seharusnya disajikan sehingga berpeluang untuk salah dinilai. Oleh karena itu, maka fasilitas yang dilakukan oleh kami di FID adalah memberikan tambahan penjelasan agar teman-teman Pemerintah Daerah bisa memenuhi.

Kemudian, kami tentu ditanya, daerah mana saja yang mengusulkan, daftar itu sudah ada di Krisna, Pak. Tentang lokasi mana yang boleh dan tidak boleh atau yang bisa dan tidak bisa itu sudah ada lokasi ada Lokpri istilahnya ada lokasi prioritas. Sebagaimana kami juga pernah sampaikan misalkan lokasi prioritas untuk ketahanan pangan misalkan. Sejak awal kami sampaikan bahwa dari PUPR artinya dari alokasi DAK yang terkait dengan irigasi misalkan tidak bisa seluruh Kabupaten Kota dialokasikan melalui kegiatan irigasi. Karena apa? Karena Lokprinya kita cermati ada juga Kabupaten Kota yang tidak punya irigasi. Tetapi karena mungkin Kabupaten Kota yang bersangkutan oleh Kementerian Pertanian memang diusulkan karena banyak produksi yang selama ini tidak menggunakan irigasi. Ada hal-hal yang seperti itu yang sangat teknis sekali Bapak-bapak.

Kalau terkait bagaimana alokasi kami juga tidak punya kewenangan mengalokasikan. Sebagaimana tadi apa saya memegang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hamka jadi ini adalah transfer ke daerah. Teman-teman keuangan jadi persis yang tadi Pak Ketua sampaikan memang mekanisme itulah yang sekarang berjalan. Kemudian, kalau ada keinginan di kita untuk *streamline* memperbaiki tentu semua kebijakan memang pasti bisa kita perbaiki Pak, apabila memang itu dianggap bisa kita *improve* untuk menjadi atau memberi pelayanan yang lebih baik, tentu dengan koridor-koridor yang sudah ada.

Kalau diizinkan karena tadi juga masalah Inpres Pak, izinkan kami *ngupdate*. Untuk Inpres karena ini sebagaimana dilaporkan oleh Pak Menteri

di hadapan para Pimpinan dan Anggota Komisi V. Bahwa arahan untuk Inpres memang sudah disetujui oleh Bapak Presiden di rapat terbatas. Oleh karena itu, sekarang Pemerintah sedang menyiapkan sudah dilakukan rapat di Sekretariat Negara untuk menyiapkan Inpres ini. Secara formal Kementerian PPN/Bappenas sudah mengusulkan izin ya, prakarsa untuk menyusun Inpres. Substansinya sedang disusun *insyaAllah* nanti malam saya sudah janji dengan tim yang Bappenas kami ketemu untuk menyampaikan masukan-masukan. Tentu aspirasi yang saran dari Bapak-Ibu yang pada siang hari ini, pagi siang hari ini kami akan bawakan, bagaimana seharusnya Inpres itu dijalankan. Mungkin itu Pak *update* tentang Inpres.

Terima kasih.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Kalau soal DAK sudah *clear* ya yang dijelaskan oleh Pak Hamka dan Pak Sekjen saya tidak mau berdebat soal DAK lagi. Menarik DAK menjadi ranah kami tampaknya sulit untuk kita laksanakan. Saya akan fokus saja kepada Inpres ya Inpres. Substansinya tidak disenggol oleh Sekjen, baru akan dibahas nanti malam dan dengan kata-kata yang penuh harapan bahwa *insyaAllah* akan memperhatikan semua saran dan masukan dari kawan-kawan Komisi V.

Tapi, tolong Pak Sekjen berikan kepada kami yang lebih gamblang substansi ya daripada isi Inpres itu apa. Kita dikasih tahu di sini jangan sampai Inpres itu nanti setelah diketok juga nasibnya akan sama dengan apa yang terjadi dengan DAK. Padahal Undang-Undang tentang Jalan itu adalah inisiasi dari kami Komisi V yang membahas adalah kami karena merespon dari usulan aspirasi permintaan dari Pemerintah Daerah dan juga mengakomodir dari dinamika tentang pembangunan infrastruktur di daerah khususnya adalah jalan. Jadi jangan sampai Inpres itu jauh daripada apa yang kita bayangkan itu. Jadi substansinya tolong disampaikan kepada kami secara *clear* jangan sampai nasi terlanjur menjadi bubur ya itulah yang tidak kita harapkan. Makanya *update* jadi setiap penyusunan Inpres ini perlu kami diberitahu.

Terima kasih.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, M.S.):

Izin Ketua terkait dengan Inpres boleh, Ketua?

KETUA RAPAT:

Iya silakan.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Saya terganggu juga coba-coba memberikan saran kepada Pak Sekjen ini. Me-refer apa yang disampaikan Pak Menteri pada waktu yang lalu beliau masih sempat bahwa oleh karena APBN yang terkait DAK-DAK itu sangat kecil jumlahnya dan beliau sendiri menyinggung persoalan DAK kemarin. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan Pak Dewo fokus pada persoalan infrastruktur yang menggantikan DAK-DAK yang jumlahnya sangat terbatas dan pakai rumus. DAK sekarang ini hanya di 58 Lokprinya yang dibuka Pak, skala prioritasnya itu DAK kecil Pak Bakri, kalau ada 10 Miliar, *alhamdulillah* itu daerah kasihan. Tapi saya senang sekali waktu disampaikan Pak Menteri bahwa Inpres ini akan mencoba mengakomodir dengan persoalan-persoalan DAK yang minim begitulah, terkait pada infrastruktur ya Pak Sekjen. Nah, oleh karena itu saya *stressing* di sini bahwa tolong dipikirkan baik-baik itu jangan sampai substansi yang ini tidak masuk di dalam Inpres, karena ini yang menjadi sasaran kita *gituloh*, Pak. Saya kira itu saja Pak Ketua terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh,

Kawan-kawan sekalian saya kan lama 12 tahun di Badan Anggaran. Yang namanya DAK itu membuat kita *dag dig dug*, sebab begitu selesai kita mengusulkan daerah-daerah terjemah DAK itu, Menteri Keuangan sama Menteri Bappenas langsung kirim kepada Pimpinan KPK, ini orangnya daerahnya ini mohon diawasi, iya termasuk Pak Hamka.

Jadi, kita kesimpulan saja Pak Sekjen, ya.

- I. Pertama, terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 Komisi V DPR RI meminta Sekjen, Irjen, dan BPSDM, dan BPIW Kementerian PUPR untuk meningkatkan penyerapan anggaran sesuai dengan target penyerapan Tahun Anggaran 2022.

Setuju, Pak Sekjen?

(RAPAT: SETUJU)

- II. Komisi V DPR RI sepakat dengan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM, dan Kepala BPIW Kementerian PUPR untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA K/L masing-masing Eselon I dalam nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023 secara lebih konkrit sesuai dengan saran dan pendapat serta usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan

RAPBN Tahun Anggaran 2023, dengan mengedepankan prinsip *good governance*.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Oh iya, silakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Kalau diizinkan boleh *nggak*, Pak, yang usulan ini kita ganti aspirasi Pak, *masa* DPR mengusulkan. Bagaimana kalau kalimat ini kita ganti aspirasi, usulan saja, Pak? Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Saya ketuk lagi ya.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian silakan, Pak Sekjen untuk menyampaikan *closing statement*.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

**Yang terhormat dan kami hormati Pak Ketua,
Wakil Ketua, dan
Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,**

Terima kasih banyak, banyak saran banyak pandangan dari Pimpinan dan Anggota yang tentu akan menjadi kewajiban bagi kami untuk menjalankannya, bahkan ada beberapa bagian yang sangat mencerahkan untuk kita melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik ke depan. Tentu sekali lagi terima kasih banyak, mudah-mudahan ke depan kami kita semua bisa bekerja sama dengan lebih baik, apa-apa yang telah tadi terjadi secara eksplisit maupun yang implisit dapat kami jalankan semua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh, dan
Selamat siang.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, rapat pada hari ini kita nyatakan ditutup

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.30 WIB)

JAKARTA, 27 Juni 2022

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002